



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERUBAHAN KEADAAN PEREKONOMIAN JEPANG
SELAMA *BUBBLE ECONOMY* (1986-1989)**

SKRIPSI

**STEFANIS NENCYANA
0705080535**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI JEPANG
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERUBAHAN KEADAAN PEREKONOMIAN JEPANG
SELAMA *BUBBLE ECONOMY* (1986-1989)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

**STEFANIS NENCYANA
0705080535**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI JEPANG
DEPOK
JANUARI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

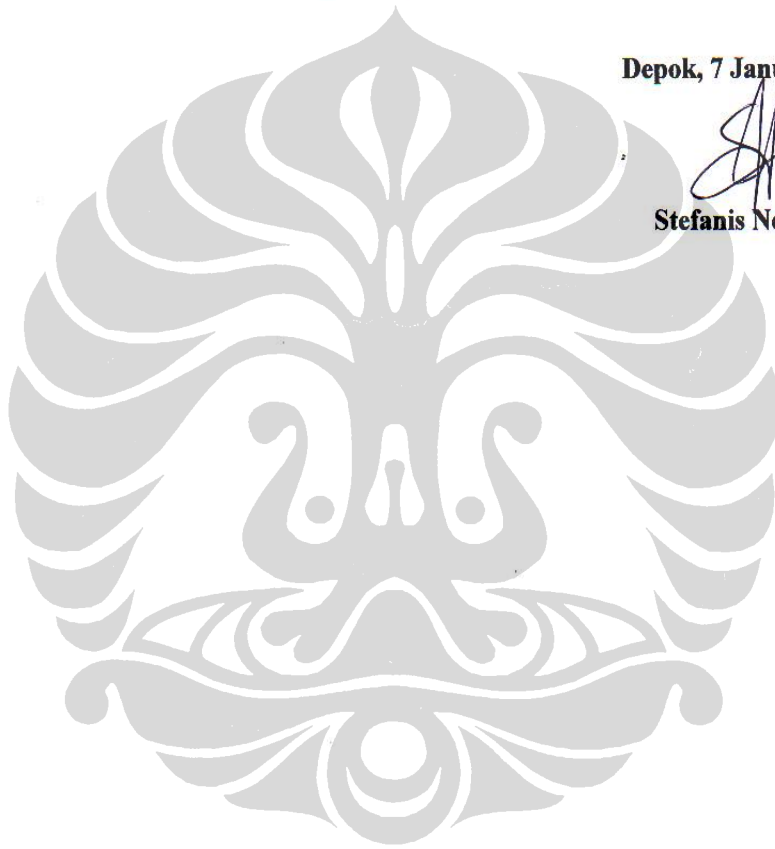
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 7 Januari 2010

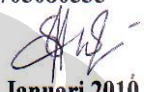


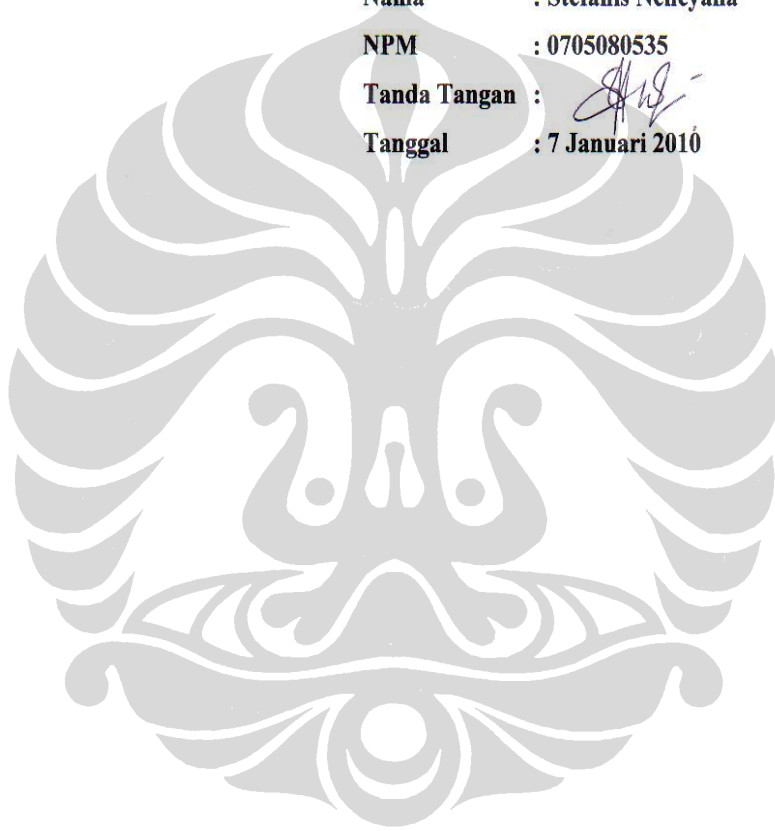
Stefanis Nencyana



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Stefanis Nencyana
NPM : 0705080535
Tanda Tangan : 
Tanggal : 7 Januari 2010




HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

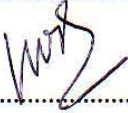
Nama : Stefanis Nencyana
NPM : 0705080535
Program Studi : Jepang
Judul Skripsi : Perubahan Keadaan Perekonomian Jepang Selama
Bubble Economy (1986-1989)

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Ferry Rustam, M.Si. (.....)

Penguji : Ansar Anwar, S.S. (.....)

Penguji : Endah Hayuni Wulandari, M.Hum. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia




Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A.

NIP. 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Jepang pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

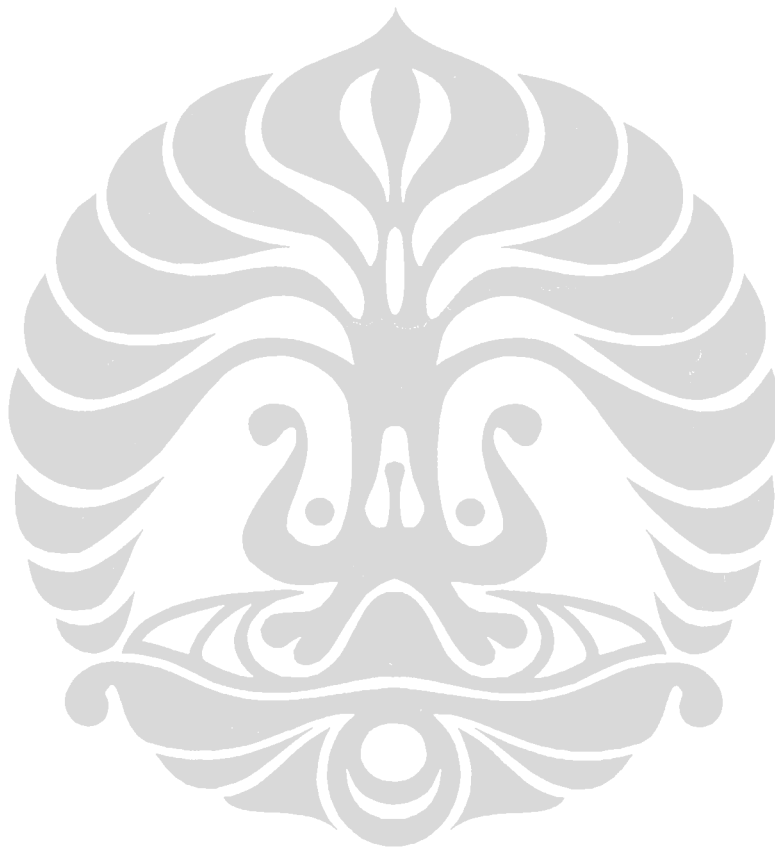
- (1) Bapak Drs. Ferry Rustam, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- (2) Bapak Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A selaku Koordinator Program Studi Jepang, Ibu Ansar Anwar, S.S selaku Ketua Panitia Ujian beserta Ibu Endah Hayuni Wulandari, M.Hum yang telah bersedia menjadi Penguji, dan memberikan saran yang bermanfaat dan membangun untuk penulis.
- (3) Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar di Program Studi Jepang yang telah mendidik saya selama menuntut ilmu di Universitas Indonesia.
- (4) Pihak perpustakaan FIB UI, PSJ UI, Pusat UI, dan Japan Foundation yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
- (5) Orang tua dan kakak-kakak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral selama penyusunan skripsi ini.
- (6) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Echa, Lyan, Primanita, Eka Prihandayani, Lenny, Reni dan teman angkatan 2005 Prodi Jepang.
- (7) Yokoyama San yang telah memberikan saya banyak inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
- (8) Teman seperjuangan selama menulis skripsi Noldi, Dhini, Tina, Muti, Ira, Edo, dan Widya yang telah memberikan semangat selama penulisan hingga sidang.

(9) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberi semangat, dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 7 Januari 2010

Penyusun



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefanis Nencyana
NPM : 0705080535
Program Studi : Jepang
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perubahan Keadaan Perekonomian Jepang selama *Bubble Economy* (1986-1989)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan

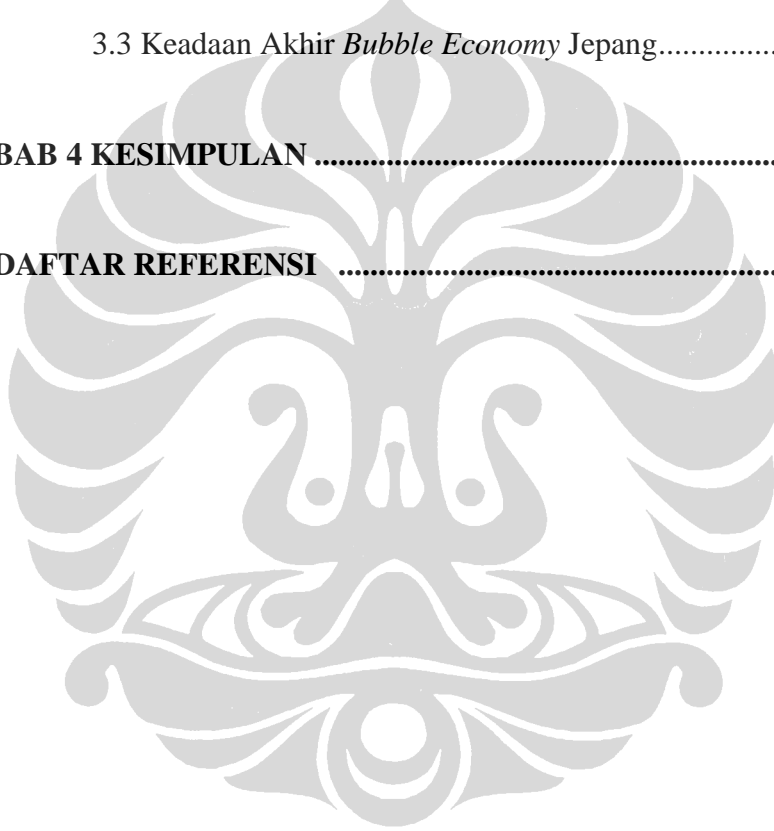


(Stefanis Nencyana)

DAFTAR ISI

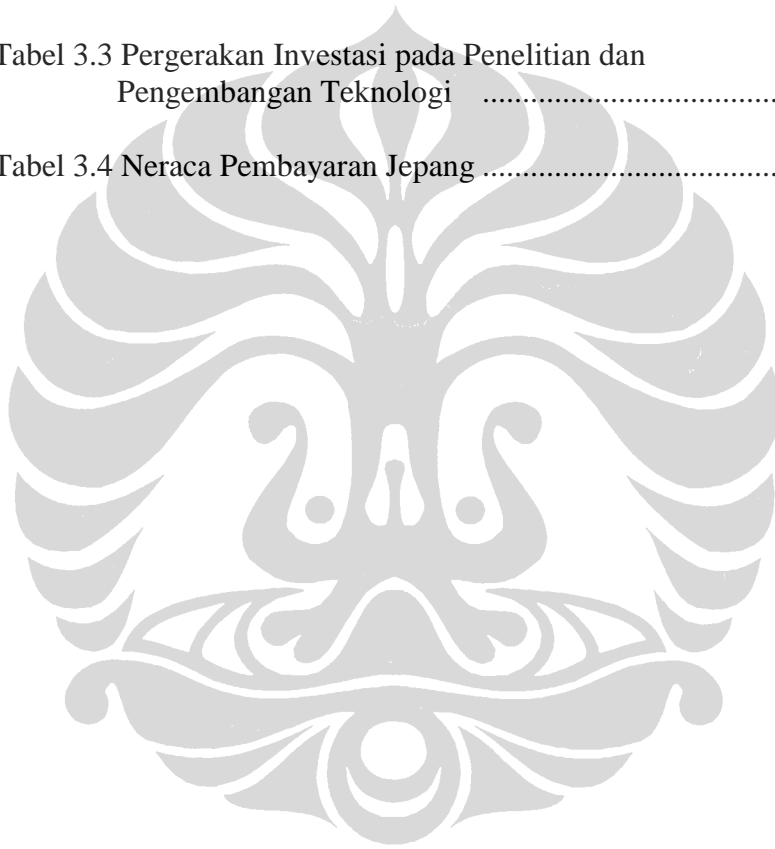
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	9
1.4 Ruang Lingkup Penulisan.....	9
1.5 Metode Penulisan	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMUNCULAN	
<i>BUBBLE ECONOMY JEPANG</i>	10
2.1 Keadaan Jepang pada Masa Paruh Pertama 1980-an	10
2.2 Keadaan Ekonomi Internasional pada Paruh Pertama 1980-an	18
2.3 Keadaan Ekonomi Jepang pada Akhir Paruh Pertama 1980-an	20
2.3.1 Perjanjian Internasional dan Regulasinya	21
2.3.2 Kebijakan Ekonomi yang Diterapkan Pemerintah Jepang	25
2.3.3 Perilaku Ekonomi pada Perusahaan dan Institusi Keuangan ..	27
2.3.4 Deregulasi untuk Internasionalisasi dalam Keamanan Produk	
Keuangan dan Keberagaman Jasa Keuangan.....	28

BAB 3 MASA <i>BUBBLE ECONOMY</i> JEPANG	30
3.1 Keadaan yang Mendukung <i>Bubble Economy</i>	30
3.1.1 Yen Tinggi (<i>Endaka</i>).....	30
3.1.2 Aliran Dana	32
3.2 Perubahan Ekonomi pada Masa <i>Bubble Economy</i>	35
3.2.1 Fluktuasi Harga Aset	35
3.2.2 Akumulasi Aset	39
3.2.3 Tingkat Konsumsi	42
3.2.4 Perluasan Industri	44
3.3 Keadaan Akhir <i>Bubble Economy</i> Jepang.....	51
BAB 4 KESIMPULAN	53
DAFTAR REFERENSI	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Index Hasil Produksi Manufaktur	11
Tabel 2.2 Persentase Keseimbangan Simpanan-Investasi Jepang	15
Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jepang pada Paruh Pertama 1980-an	16
Tabel 3.1 Nilai Tukar Yen terhadap Dolar	31
Tabel 3.2 Jumlah Pinjaman Dana dari Bank	33
Tabel 3.3 Pergerakan Investasi pada Penelitian dan Pengembangan Teknologi	45
Tabel 3.4 Neraca Pembayaran Jepang	50



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Komposisi Ekspor Jepang	12
Grafik 2.2 Komposisi Impor Jepang	13
Grafik 2.6 Jumlah Ekspor Produk Elektronik ke Amerika dan Eropa	18
Grafik 3.1 Pergerakan Harga Saham Nikkei	36
Grafik 3.2 Pergerakan Harga Tanah.....	38
Grafik3.3 Komposisi Kepemilikan Aset Individu	40
Grafik 3.4 Aset Nasional sebagai Rasio pada PNB	41
Grafik 3.5 Pergerakan <i>Capital Gain</i> pada Tanah dan Saham	43
Grafik 3.6 Pergerakan Jumlah Ekspor dan Rasio Impor.....	46
Grafik 3.7 Investasi Asing Langsung pada Industri Manufaktur.....	48
Grafik 3.8 Perbandingan Produksi Kendaraan Dalam Negeri dan Luar Negeri dan Produksi Alat Elektronik di Luar Negeri	49

ABSTRAK

Nama : Stefanis Nencyana
Program Studi : Jepang
Judul : Perubahan Keadaan Perekonomian Jepang Selama
Bubble Economy (1986-1989).

Penelitian dalam skripsi ini membahas keadaan ekonomi Jepang yang terjadi selama *bubble economy* (1986-1989) sebagai bagian dari perkembangan ekonomi Jepang. Perkembangan perekonomian Jepang dibangun melalui fase dalam siklus bisnis Jepang. *Bubble economy* merupakan salah satu fase dari siklus bisnis Jepang yang kemunculannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut memberikan perubahan pada perekonomian Jepang selama masa *bubble economy* yang terjadi pada paruh kedua 1980-an. Perubahan ekonomi yang terjadi adalah fluktuasi harga aset, akumulasi aset, tingkat konsumsi dan perluasan industri. Perubahan keadaan ekonomi tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jepang selama paruh kedua 1980-an.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dalam metode penulisan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari bahan kepustakaan berupa buku teks, artikel, jurnal, dan sumber internet. Penggunaan grafik dan tabel sebagai pendukung penjelasan perubahan perekonomian Jepang.

Kata Kunci :
Sejarah ekonomi Jepang, *bubble economy*, kebijakan ekonomi.

ABSTRACT

Name : Stefanis Nencyana
Study Program : Japanese Studies
Title : The Japanese Economy Changes throughout
the *Bubble Economy* (1986-1989)

Research in this thesis discusses the economic situation that occurred during the Japanese bubble economy (1986-1989) as part of the Japan's economic development. The Japan's economic development is built through a phase in the Japanese business cycle. Bubble economy is one phase of the Japanese business cycle that the emergence is influenced by internal and external factors. Both factors provide a change in the Japanese economy during the era of bubble economy that occurred in the second half of the 1980s. Economic changes that occurred are fluctuations in asset prices, asset accumulation, the level of consumption and industrial expansion. Changes in that economic conditions affect Japan's economic growth during the second half of the 1980s.

This research uses historical approach with descriptive-analytical writing method. Data collected from library materials in the form of text books, articles, journals, and internet sources. The use of graphs and tables to support the explanation of Japanese economy changes.

Keywords:
Japanese economic history, bubble economy, economic policy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Perang Dunia II, Jepang terus-menerus mengalami perkembangan ekonomi, baik secara domestik maupun internasional. Tahun 1972 Jepang menjadi produsen serat sintesis, karet, besi dan mobil.¹ Kemajuan ini meningkatkan komposisi ekspor Jepang antara tahun 1970 hingga 1983, yaitu industri mesin dan peralatan dari 45 persen menjadi 68 persen dan industri mobil dari 7 persen menjadi 18 persen.² Selain itu, Produk Nasional Bruto (PNB)³ Jepang dari tahun ke tahun meningkat hingga tahun 1983 mencapai sekitar 1,2 milyar dolar setara dengan 285 triliun yen (merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat).⁴ Keadaan ini memengaruhi peningkatan pendapatan per kapita Jepang yang menurut Lembaga Perencanaan Ekonomi Pemerintah Jepang seperti dimuat di *Asahi Shimbun*, tanggal 21 Desember 1984, masyarakat Jepang memiliki pendapatan lebih tinggi daripada Prancis, Belanda, dan Inggris.⁵ Posisi Jepang yang melampaui negara Barat tersebut membuat Jepang berusaha mempertahankan kemajuan ekonomi dan teknologinya.

Jepang mengalami berbagai tahapan dalam perkembangan ekonomi, tahapannya adalah *boom*⁶ dan *bubble economy* yang merupakan fase dalam siklus bisnis. Siklus bisnis memiliki beberapa fase kejadian yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang.⁷

¹ Kunio, Yoshihara. *Pembangunan Ekonomi Jepang*. (Jakarta: Gramedia, 1992). hlm 21.

² *Ibid.*, 25.

³ Ukuran aktivitas ekonomi seluruh sektor

⁴ Tahun 1983 nilai tukar yen terhadap dolar senilai 237.51 yen per dolar. *Ibid.*, 24.

⁵ *Ibid.*, 32.

⁶ *Boom* (membumbung tinggi) adalah perluasan yang cepat sekali dalam volume kegiatan ekonomi terutama produksi, biasanya diikuti dengan kenaikan harga dan meningkatnya pembelian, penjualan surat berharga dan komoditi. A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1991). hlm 140.

⁷ Siklus bisnis adalah peningkatan yang berirama dalam kegiatan usaha pada umumnya, yang ditandai oleh suatu kecenderungan bagi harga, keuntungan produksi, upah dan kesempatan kerja untuk bergerak bersama-sama dalam siklus yang lengkap dari puncak ke puncak selama suatu periode beberapa tahun. Siklus ini terdiri dari : pemulihan, kemakmuran, resesi, dan depresi yang tidak selalu berurutan dalam periode tertentu. *Ibid.*, hlm 151

*Economic Planning Agency*⁸ mengklasifikasi masa pertumbuhan ekonomi Jepang dalam berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal seperti inventaris perusahaan, peralatan produksi, dan infrastruktur, dan eksternal seperti kemajuan teknologi, inflasi dunia, krisis minyak, Yen tinggi, friksi perdagangan Jepang dan Amerika.⁹

Siklus bisnis Jepang yang pertama adalah *Jinmu Boom* (神武ブーム) terjadi dari November 1954 hingga Juni 1957.¹⁰ Pada fase ini terjadi peningkatan kegiatan ekonomi investasi yaitu investasi peralatan teknologi sektor swasta untuk produk konsumerisme, seperti televisi hitam-putih, lemari es, dan mesin cuci. Ketiga produk tersebut banyak diproduksi oleh perusahaan swasta dan digunakan oleh masyarakat Jepang pada masa itu.¹¹ Tingkat konsumsi dalam negeri terhadap produk tersebut tinggi sehingga mengakibatkan kenaikan harga produk dan defisit neraca pembayaran¹² terhadap perdagangan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakan pengetatan uang. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut Jepang mengalami pemulihan ekonomi selama satu tahun.

Setelah masa pemulihan ekonomi, Jepang memasuki siklus yang kedua yaitu *Iwato Boom* (岩戸ブーム) yang terjadi antara Juni 1958 dan Desember 1961.¹³ Pada fase ini terjadi perluasan kegiatan investasi terhadap peralatan

⁸ *Economy Planning Agency* atau Lembaga Perencanaan Ekonomi Pemerintah berada di bawah perdana menteri dan kedudukannya setara dengan MITI (Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional) dan Kementerian Keuangan yang memfokuskan pada koordinasi kebijakan ekonomi sebagai persiapan perencanaan ekonomi jangka panjang, dan menerbitkan laporan ekonomi tahunan (*Keizai Hakusho/Economic White Paper*, dalam versi bahasa Inggris *The Economic Survey of Japan*)

⁹ Hsu, Robert C. *The MIT Encyclopedia of Japanese Economy*. (London : MIT Press Cambridge, 1999). hlm 51.

¹⁰ Nama fase diambil dari sejarah kuno Jepang yaitu Jinmu (神武) adalah kaisar dalam sejarah legenda kekaisaran Jepang yang berkuasa pada 660 hingga 585 sebelum Masehi.

¹¹ Televisi hitam-putih tahun 1956 diproduksi sejumlah 300.000 unit, tahun 1958 sejumlah satu juta unit; mesin cuci tahun 1958 diproduksi mencapai satu juta unit (Kosai, Yutaka. *The Era High-Speed Growth*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1991). hlm 99.

¹² Defisit adalah kekurangan pada sejumlah uang untuk menutupi selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Neraca pembayaran adalah suatu perkiraan yang terperinci mengenai transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan yang diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, meliputi ekspor-impor, transaksi modal, dan investasi negara lain. A. Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. (Jakarta: Pradya Paramita, 1991). hlm 77.

¹³ *Iwato* (岩戸) adalah tempat kematian dewi matahari *Amaterasu*.

industri dengan teknologi baru. Banyak perusahaan melakukan impor mesin berteknologi baru dari negara Barat untuk meningkatkan jumlah produksi. Hal ini memicu perkembangan industri konstruksi, transportasi, dan komunikasi. Menjelang akhir siklus bisnis kedua, sekitar tahun 1960 dikeluarkan kebijakan *income-doubling plan* yang bertujuan meningkatkan standar hidup nasional yang lebih tinggi dan kesempatan kerja penuh melalui pertumbuhan mantap dan maksimal.¹⁴ Penerapan kebijakan tersebut adalah investasi peralatan produksi besar-besaran selama tahun 1960 yang mengakibatkan peningkatan produksi dan kenaikan upah sebesar 13,8 persen pada tahun 1961.¹⁵ Impor terhadap kebutuhan pabrik dan peralatan produksi sangat diperlukan untuk mengimbangi peningkatan produksi yang terjadi pada tahun 1960, maka kenaikan inventaris perusahaan pun meningkat. Namun, terjadinya penahanan ekspor pada produk dalam negeri mengakibatkan neraca pembayaran menunjukkan defisit. Hal tersebut karena jumlah impor lebih besar daripada ekspor. Kelebihan jumlah impor berpengaruh terhadap penggunaan mata uang Yen dalam negeri. Yen digunakan di dalam negeri Jepang untuk membeli mata uang asing dan membiayai impor. Kondisi itu memicu pengurangan devisa dan mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan uang ketat yang bertujuan untuk menahan peningkatan permintaan dalam negeri dan inventaris perusahaan swasta. Kemudian, Jepang pun mengalami pemulihan ekonomi selama satu tahun.

Beberapa tahun setelah pemulihan ekonomi akibat *Iwato Boom*, pada Oktober 1965 hingga Juli 1970 terjadi siklus bisnis ketiga yaitu, *Izanagi Boom* (いざなぎブーム).¹⁶ Pada fase ini terjadi peningkatan kegiatan ekonomi pada investasi swasta di pabrik dan peralatan, pergeseran besar pada jumlah angkatan kerja dari industri primer yang padat karya ke industri sekunder yang berlimpah tenaga kerja berkualitas, dan peningkatan produktivitas industri yang disebabkan karena mengadopsi dan memperbaiki teknologi asing pada beberapa produk, seperti produk mobil, pendingin ruangan (*air conditioner*), dan televisi warna.

¹⁴ Rencana Penggandaan Pendapatan oleh Perdana Menteri Hayato Ikeda (1960-1964)

¹⁵ Nakamura, Takafusa. *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*. (Tokyo : Kementerian Luar Negeri Jepang, 1985). hlm 86.

¹⁶ *Izanagi* (いざなぎ) adalah saudara laki-laki dari dewa Izanami, yang ada dalam legenda kemunculan kepulauan Jepang.

Peningkatan investasi dan produktivitas tersebut mengakibatkan harga rendah dan stabil pada pasar dalam negeri sehingga perusahaan mobil mencoba untuk mengekspor setelah tahun 1965. Tidak hanya produk mobil tetapi juga beberapa produk industri berat, dan kimia pun mengalami kenaikan ekspor sebesar 82 persen, dan produk lainnya.¹⁷ Akibatnya, terjadi surplus perdagangan Jepang yang meningkatkan cadangan devisa. Keadaan ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Jepang pada kecepatan yang tinggi sebesar lebih dari 10 persen per tahun setelah pertengahan tahun 1960-an.¹⁸ Secara tidak langsung pola konsumsi masyarakat Jepang pun mengalami pergeseran, dari kehidupan tradisional ke kehidupan negara maju, seperti hiburan dan kegiatan waktu senggang. Kehidupan negara maju menjadi kegemaran masyarakat Jepang seperti, golf, tenis, berlibur di dalam negeri maupun ke luar negeri, makan di restoran, dan beragam kegiatan budaya seperti merangkai bunga, upacara minum teh dan musik. Bersamaan dengan kenyamanan keadaan tersebut, selain ekspor meningkat, terjadi juga inflasi global yang mengakibatkan kenaikan harga impor, mengingat pada saat itu terjadi kenaikan pesat harga grosir di dalam negeri dari tahun 1969 hingga 1970.¹⁹ Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan uang ketat lagi untuk mengendalikan permintaan dalam negeri supaya dapat mengekang inflasi tahun 1970-an. Kebijakan tersebut menghasilkan resesi ekonomi Jepang selama satu tahun. Meskipun pemerintah mengatasi masalah ini dengan memperluas pengeluaran dana, dan penyediaan dana Bank Sentral Jepang, tetapi resesi terus berlangsung sampai tahun 1971.

Setelah bangkit dari resesi *Izanagi Boom*, Jepang mengalami krisis minyak pertama yang kemudian disusul dengan siklus bisnis keempat yaitu *endaka* pada Oktober 1977 hingga Februari 1980. *Endaka* adalah meningginya nilai Yen terhadap Dolar untuk pertama kali pada nilai 180 yen per dolar. Keadaan ini mengakibatkan rendahnya biaya impor bahan baku (dalam dolar) sehingga permintaan dalam negeri meningkat. Tahun 1979, terjadi perluasan investasi

¹⁷ Ekspor baja sejumlah 23.62 juta ton, televisi sejumlah 6.25 juta unit, alat perekam pita sejumlah 20.18 juta unit. Nakamura, Takafusa. *op. cit.*, hlm 101.

¹⁸ www.stat.go.jp/english/data/handbook/c03cont.htm

¹⁹ Inflasi global adalah kejutan *Nixon* merupakan Program Ekonomi Baru Amerika Serikat oleh Presiden Nixon pada Agustus 1971 yang menanggukkan penukaran dolar ke emas dan pembebanan biaya tambahan impor sebesar 10 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam inflasi dan mencegah impor di Amerika Serikat. Nakamura, Takafusa. *op. cit.*, hlm 102.

swasta pada pabrik dan peralatan. Bersamaan dengan fase ini juga terjadi kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan inflasi produk industri, untuk mengantisipasinya dikeluarkan kebijakan uang ketat dan pembatasan pengeluaran fiskal sehingga Jepang dapat terhindarkan dari inflasi tersebut.²⁰ Namun, siklus bisnis ini pada akhirnya mengalami resesi berkepanjangan selama 36 bulan.

Setelah *Endaka*, Jepang memasuki tahun 1980-an, perekonomian Jepang lebih mengarah ke internasionalisasi. Berawal dari struktur industri yang telah dibangun pada fase sebelumnya, Jepang pada tahun 1983 bertanggung jawab terhadap 8.8 persen ekspor seluruh dunia, dan 7.3 persen impor dunia.²¹ Hal tersebut berarti bahwa keadaan ekonomi internasional dapat dipengaruhi oleh Jepang karena didukung dengan pemfokusan pada pengembangan industri dan teknologi. Pengaruh tersebut memunculkan friksi perdagangan pada hubungan ekonomi bilateral Jepang-Amerika, Amerika pada masa itu merupakan negara adikuasa dalam perekonomian dunia. Kondisi ini membawa perekonomian Jepang memasuki masa internasionalisasi yang dipengaruhi perkembangan perekonomian negara-negara maju lainnya.

Setelah paruh pertama tahun 1980-an, perekonomian Jepang mengalami kemajuan dengan memasuki siklus bisnis kelima pada November 1986 hingga Desember 1989 yaitu *Heisei Boom (bubble economy)*.²² Pada masa ini terjadi peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk konsumen, *real estate*,²³ investasi peralatan dan nilai tambah teknologi. Akan tetapi, peningkatan permintaan dalam negeri tersebut mengakibatkan kemudahan terhadap kredit dan keuntungan pembelian tanah dan saham. Keadaan ini lah yang menjadikan melambungnya harga saham dan tanah sehingga banyak masyarakat Jepang yang melakukan investasi pada saham dan tanah. Ketika pemerintah melihat adanya ketidaksehatan dalam penggunaan kredit, spekulasi yang berlebihan terhadap harga, dan resiko inflasi terhadap harga barang yang lain. Pemerintah menaikkan suku bunga pinjaman dan kebijakan uang ketat yang berakibat jatuhnya harga saham dan tanah pada awal tahun 1990. Keadaan tersebut disebut pecahnya

²⁰ Terjadi krisis minyak yang pertama tahun 1973 dan kedua tahun 1978.

²¹ Kunio, Yoshihara, *op. cit.*, hlm 111.

²² Kematian kaisar Showa pada Januari 1989 menandai perubahan masa kekaisaran di Jepang dari masa Showa ke Heisei sebagai masa kekaisaran baru yaitu Kaisar Akihito.

²³ *Real estate* terdiri dari rumah, tanah, dan bangunan.

bubble economy, dimana Jepang memasuki masa resesi dengan masalah hutang yang besar pada institusi keuangan dan perusahaan. Memasuki awal dekade 1990-an, Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat *bubble economy*.

Jinmu Boom, Iwato Boom, Izanagi Boom, Endaka dan *Bubble Economy* merupakan fase yang menunjukkan bahwa Jepang mengalami perkembangan ekonomi dalam proses dan jangka waktu yang panjang. *Boom* pada tahun 1950 hingga 1969-an merupakan periode perkembangan investasi teknologi, terutama pada peralatan industri yang menjadikan Jepang sebagai negara produsen dan pengeksport produk elektronik. Pada tahun 1970-an merupakan periode penyesuaian pada perkembangan ekonomi yang telah dibangun pada dekade sebelumnya. Pada awal dekade 1980-an, Jepang memasuki masa kestabilan ekonomi yang disertai pengaruh negara barat. Masa ini lah yang membawa Jepang kepada fase *bubble economy*, dan membawa perubahan terhadap ekonomi Jepang pada akhir 1980-an. Fase ekonomi tersebut menandai tahap ekonomi baru pada awal masa *Heisei*.

Bubble economy merupakan masa peningkatan kegiatan ekonomi yang berbeda dari keempat fase sebelumnya. Pernyataan tersebut menarik untuk dikaji apakah sebenarnya fase *bubble economy*. Ditelaah dari pengertian kata, menurut *Financial Dictionary* definisi *bubble* secara umum adalah meningkatnya harga aset (saham, *real estate*, perhiasan, lukisan, barang antik, komoditi) secara terus menerus dengan harapan akan menarik pembeli baru. Harapan tersebut didasarkan pada informasi harga pasar yang mencerminkan keadaan pada masa itu. Biasanya penjual maupun pembeli tertarik pada keuntungan perdagangan aset. Namun, ketika harga mencapai titik tertentu, dan terjadi penurunan harga aset maka para pembeli maupun penjual merugi sehingga terjadi krisis keuangan.²⁴ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *bubble economy* merupakan menggelembungnya harga aset, atau dapat juga dikatakan ekonomi gelembung

Bubble economy selain terjadi di Jepang, sebelumnya juga banyak terjadi di negara-negara barat dan memiliki istilah yang berhubungan dengan tempat terjadinya. Di Belanda (1634-1638) disebut sebagai *Tulipmania*, di Prancis (1719-

²⁴ Kindleberger, Charles P. *The New Palgrave a Dictionary of Economic*. (New York : Macmillan Press, 1996). hlm 281.

1720) disebut sebagai *the Missisipi Bubble*²⁵, di Inggris (1720) disebut sebagai *the south sea bubble*²⁶ dan di Amerika sebelum terjadi depresi tahun 1930 telah terjadi *the bull market* (1924-1929).²⁷ Di Jepang keadaan ekonomi seperti ini disebut *ストック経済/sutokku keizai* atau ekonomi saham yang sama dengan ekonomi gelembung atau *バブル経済/baburu keizai* yang terjadi selama akhir tahun 1980-an.²⁸ Terjadinya *bubble economy* di beberapa negara Barat dan Jepang membuat para ahli ekonomi meneliti penyebab *bubble economy*.

Salah satu ahli menyatakan bahwa penyebab *bubble economy* adalah faktor internal dan eksternal, khususnya pada *bubble economy* di Jepang. Profesor sejarah *Jeff Kingston* menyatakan tentang sebab *bubble economy* Jepang bahwa :

*The asset bubble was not merely a result of this speculative frenzy- both international developments and domestics factors combined to pump it.*²⁹

Aset menggelembung bukanlah hasil dari spekulasi³⁰ yang hebat saja tetapi penggabungan kedua faktor dalam negeri dan perkembangan internasional yang memicu penggelembungan harga aset.

Faktor internal dan eksternal lebih menjelaskan keadaan sesungguhnya perekonomian negara, khususnya Jepang. Faktor internal adalah faktor yang dari dalam negeri dan faktor eksternal adalah faktor luar, seperti perkembangan internasional dan kerjasama internasional. Dari kedua faktor tersebut maka dapat dijabarkan faktor-faktor yang memicu terjadinya *bubble economy* di Jepang, yaitu kebijakan ekonomi, perilaku ekonomi, deregulasi terhadap internasionalisasi ekonomi, dan perjanjian internasional,

²⁵ Perusahaan koloni Prancis yang bernama *Missisipi Company* bertempat di daerah koloni Prancis di Amerika Serikat.

²⁶ Perusahaan milik Inggris yang melakukan perdagangan di Amerika Selatan.

²⁷ www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/dotcon/historical/bubbles.html.

²⁸ Hideo, Satake. *Nihon Keizai e no Apurochi*. (Tokyo: Minerva,1992), hlm 158.

²⁹ Kingston, Jeff. *The Quiet Transformation*. (New York : Routledge Curzon, 2005). hlm 5.

³⁰ Spekulasi adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan tindakan yang bersifat untung-untungan; perihal membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar.

Faktor eksternal dan internal dapat menelaah keadaan ekonomi Jepang saat memasuki masa *bubble economy*. Keadaan ekonomi Jepang pada masa *bubble economy* menurut *Economic Survey of Japan*³¹ terdiri dari tiga tahapan, yaitu konsumerisme produk kelas atas meliputi gaya hidup, standar hidup yang tinggi, sentralisasi teknologi dan industri yang mengarah ke peningkatan permintaan dalam negeri. Kemudian terjadi globalisasi yang mengarah ke internasionalisasi yaitu perkembangan kerjasama internasional yang menghasilkan peningkatan investasi. Selanjutnya, adalah akumulasi aset oleh individu dan perusahaan. Ketiga tahapan tersebut mencerminkan keadaan ekonomi Jepang pada masa *bubble economy*.

Keadaan ekonomi Jepang pada masa *bubble economy* juga telah menjadikan Jepang sebagai negara yang berpartisipasi dalam perekonomian dunia internasional. *Economic Survey of Japan* juga menyatakan bahwa Jepang menjadi negara pemberi pinjaman terbesar bagi negara berkembang. Keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena masa akhir *bubble economy* memberikan banyak masalah terhadap perekonomian Jepang yang berdampak resesi pada awal tahun 1990-an.

Meningkat perekonomian Jepang pada dekade 1980-an dikarenakan terjadinya fase *bubble economy* pada akhir 1980-an, yang telah membawa Jepang sebagai negara maju dalam perekonomian. Ekonomi Jepang akhir 1980-an dilalui dengan fase *bubble economy* sebagai upaya untuk mempertahankan kemajuan ekonomi yang telah dibangun pada fase sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Jepang mengalami kemajuan ekonomi melalui siklus bisnis. *Bubble economy* merupakan fase terakhir dari siklus bisnis Jepang. Karena setiap fase memberikan perubahan terhadap ekonomi Jepang, maka perubahan ekonomi yang terjadi selama *bubble economy* sebagai bagian dari perkembangan ekonomi Jepang menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perubahan keadaan ekonomi Jepang selama terjadinya *bubble economy*. Berdasarkan uraian dari latar

³¹ *Japan Economic Survey 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency, 1989). hlm 2.

belakang maka pertanyaan dalam pembahasan ini adalah perubahan apakah yang terjadi terhadap keadaan ekonomi Jepang selama *bubble economy*.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan perubahan ekonomi Jepang selama *bubble economy* untuk menunjukkan keadaan ekonomi Jepang pada masa itu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dari paruh pertama tahun 1980-an sebagai keadaan sebelum kemunculan *bubble economy* hingga masa akhir *bubble economy* pada tahun 1990.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari data yang ada dan menganalisisnya. Data ini diambil melalui studi kepustakaan yaitu dari artikel, jurnal, buku teks, majalah, surat kabar, ensiklopedia dan *website* internet yang berhubungan dengan sejarah perekonomian Jepang. Tabel dan grafik digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab. Pada bab satu berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab dua berisi penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan *bubble economy* Jepang. Bab tiga menjelaskan berbagai perubahan keadaan ekonomi Jepang yang terjadi selama masa *bubble economy*. Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan dalam skripsi ini.

BAB 2

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemunculan *Bubble Economy* Jepang

2.1. Keadaan Ekonomi Jepang pada Masa Paruh Pertama 1980-an

Setelah krisis minyak kedua dan *endaka boom* pada akhir 1970-an, Jepang mengalami resesi selama tiga tahun. Pertumbuhan ekonomi melemah dari 4 persen pada 1981 menjadi 3.3 persen pada tahun 1982-1983.³² Sumber utama pada industri mengalami stagnasi, yaitu investasi peralatan pabrik dan konstruksi. Bersamaan dengan berakhirnya masa resesi, Jepang berusaha bangkit dengan melakukan pemulihan ekonomi. Perekonomian yang telah dibangun pada dekade sebelumnya berusaha dikembangkan pada masa ini.

Pemulihan dilakukan pada pengembangan kemampuan industri swasta skala menengah dan kecil maupun pemerintah. Tahun 1981 Kementerian Keuangan melakukan penerapan kebijakan, sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan fiskal dengan tidak menaikkan pajak hingga tahun 1983.
2. Peningkatan investasi teknologi industri dalam negeri sebagai upaya memulihkan kestabilan ekonomi.
3. Penghematan energi dan biaya produksi.
4. Pembatasan tarif ekspor.
5. Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment/gannen*) melalui perusahaan Jepang di negara lain.³³

Kebijakan berikutnya adalah, April 1983 Kementerian Industri dan Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan pertumbuhan industri sebagai tindakan restrukturisasi industri, menyediakan peningkatan bisnis dan investasi dalam memodernisasi peralatan pabrik, dan program pinjaman serta investasi fiskal diperluas yang ditujukan kepada industri kecil untuk memperoleh subsidi bunga pinjaman rendah dan tarif pajak tertentu.

³² Kunio, Yoshihara. *op.cit.*, hlm 23.

³³ Lincoln, Edward .J . *Japan : Facing Economic Maturity*. (US : The Brookings Institution, 1988). hlm 118

Kedua kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan peningkatan hasil produksi pada berbagai sektor industri, terutama industri manufaktur. Industri manufaktur mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam pengembangan teknologi dan peralatan produksinya. Hal tersebut mendorong peningkatan hasil produksinya. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Index Hasil Produksi Manufaktur

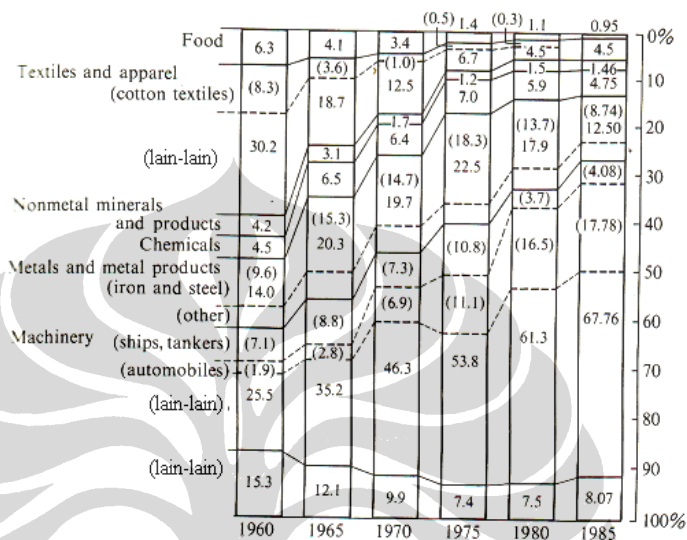
Industri (1973=100)	1980	1985
Baja	105.3	106.3
Mesin	141.6	207
Elektrik	122.8	151.1
Mesin Transportasi	166.3	340.1
Transportasi kecuali, kapal dan kereta	163.5	180.5
Produk Kimia	129.4	157.2
Tekstil	91.5	89.3
Produk batubara dan Minyak	95.0	80.1
Produk Plastik	102.7	118.6
Keramik	104.7	100.6
Makanan	114.4	116.4

Sumber : Nakamura, Takafusa. *The Postwar Japanese Economy :The Development and Structure 1937 - 1994*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995), hlm 232.

Melihat Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa hasil produksi manufaktur hingga akhir paruh pertama tahun 1980-an yaitu baja, mesin, mesin transportasi, produk plastik, transportasi, dan kimia mengalami kenaikan. Pemberian investasi pada nilai tambah produk manufaktur yang mengalami kenaikan telah menjadikan produk tersebut sebagai produk andalan dalam negeri Jepang. Penurunan pada beberapa industri, seperti industri tekstil, keramik, batubara dan minyak menunjukkan bahwa industri Jepang memfokuskan pada pengembangan teknologi, penghematan penggunaan energi, dan penggunaan tenaga kerja berkualitas untuk dapat memproduksi dalam jumlah banyak. Konsentrasi itu mendukung Jepang untuk meningkatkan persaingan industri dengan negara lain.

Sejak tahun 1960-an Jepang telah mengembangkan dan memasarkan produknya ke berbagai negara, di Asia, Eropa, dan Amerika, karena melihat adanya peluang yang baik di pasar mancanegara. Alasan lainnya, adalah Jepang harus mengimbangi jumlah produk yang dihasilkan dengan permintaan.

Permintaan dalam negeri kurang dapat mengimbangi jumlah produk yang dihasilkan. Untuk itu, didukung dengan investasi pada teknologi maka produk Jepang dipasarkan ke negara lain agar dapat bersaing dengan produk negara lain. Melalui ekspor, Jepang memasarkan hasil produksinya dan bersaing di pasar mancanegara. Jumlah dan jenis produk ekspornya dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1 Komposisi Ekspor Jepang

Sumber : Komiya, Ryutaro. *The Japanese Economy : Trade, Industry, and Government*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1993). hlm 19.

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas diketahui bahwa pada permintaan negara lain terhadap produk Jepang sangat tinggi sehingga jumlah dan jenis ekspor produk Jepang mengalami peningkatan. Penurunan pada persentase ekspor industri tekstil, makanan, menunjukkan Jepang telah beralih ke teknologi industri berat, seperti mobil dan sepeda motor (*automobile*), baja, dan peralatan. Ini mengakibatkan ekspor peralatan mesin, otomotif, baja meningkat. Memasuki tahun 1985, jumlah ekspor produk tersebut semakin meningkat, selain karena investasi teknologi, keadaan ekonomi internasional juga mendukung keadaan tersebut. Penetapan pembatasan tarif ekspor yang minim dan jenis produk yang diizinkan masuk ke beberapa negara membuat Jepang semakin menguasai pasar mancanegara, terutama untuk produk mobil dan sepeda motor (*automobile*) buatan Jepang yang menguasai pasar Asia dan Amerika.

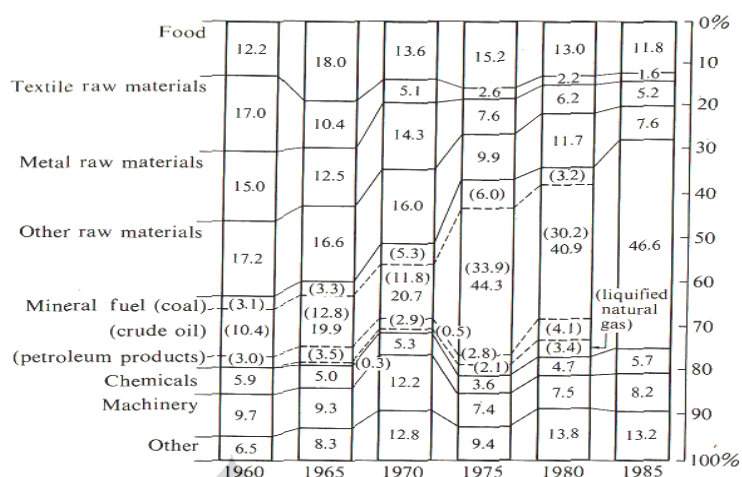
Persaingan produk Jepang dengan negara lain tidak hanya melalui ekspor, tetapi juga melalui investasi pengembangan berbagai produk yang diproduksi dan

dipasarkan di negara lain (Penanaman Modal Asing). Investasi ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan transportasi sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih besar dibandingkan produksi di dalam negeri. Investasi Jepang tersebut mengalami kenaikan dari 9 milyar dolar pada tahun 1981 menjadi 10 milyar pada tahun 1985. Investasi dilakukan pada berbagai sektor dari tahun 1981 hingga 1986, yaitu manufaktur senilai 15,633 milyar dolar, jasa keuangan dan asuransi senilai 15,673 milyar dolar, *real estate* senilai 6,531 milyar dolar, transportasi senilai 7,826 milyar dolar, perdagangan senilai 9,129 milyar dolar, pertambangan senilai 5,353 milyar dolar, pertanian dan perikanan senilai 380 milyar dolar dan sektor lainnya senilai 8,949 milyar dolar.³⁴ Negara tujuan investasi langsung pada tahun 1985 adalah Amerika Utara sebesar 27,608 milyar dolar, Amerika Latin sebesar 14,205 milyar dolar, Asia sebesar 11,961 milyar dolar, Eropa sebesar 10,000 milyar dolar dan sisanya adalah Afrika, Timur Tengah.³⁵ Jumlah investasi kepada negara tujuan menunjukkan bahwa Jepang secara tidak langsung mendominasi perekonomian negara lain dengan cara berpartisipasi dalam perekonomian internasional melalui investasi secara langsung kepada beberapa negara, terutama Amerika Utara.

Mengimbangi jumlah produksi yang dihasilkan dan mendukung berlangsungnya proses produksi maka diperlukan bahan baku yang cukup. Bahan baku tidak didapatkan dari Jepang, tetapi harus diimpor dari negara lain. Selain bahan baku, untuk memenuhi permintaan dalam negeri, Jepang perlu mengimpor produk dari negara lain. Produk yang diimpor Jepang dapat dilihat pada Grafik 2.2.

³⁴ Komiya, Ryutaro. *The Japanese Economy : Trade, Industry, and Government*. (Tokyo: University of Tokyo Press, 1993). hlm 119.

³⁵ *Ibid.*,123



Grafik 2.2 Komposisi Impor Jepang

Sumber : Komiya, Ryutaro. *The Japanese Economy : Trade, Industry and Government*. (Tokyo: University of Tokyo Press, 1993). hlm 19.

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa kebutuhan Jepang terhadap bahan baku minyak mentah (*crude oil*) sangat menguasai impor Jepang selama sepuluh tahun dari tahun 1975 hingga 1985. Kebutuhan minyak mentah pada tahun 1985 mencapai 46.6 persen. Sedangkan impor makanan menurun dari 13 persen menjadi 11.8 persen. Bahan baku tekstil juga menurun dari 2.2 persen menjadi 1.6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang lebih membutuhkan minyak mentah dibandingkan kebutuhan lain, seperti makanan dan bahan baku tekstil. Minyak mentah dibutuhkan untuk membantu proses produksi pada industri mesin, elektronik, otomotif, plastik, dan baja. Ini artinya Jepang banyak mengimpor dari negara penghasil minyak seperti Timur Tengah, Indonesia, dan lainnya. Dilihat dari menurunnya jumlah impor makanan, tekstil dan lainnya, maka permintaan dalam negeri Jepang terhadap produk negara lain menjadi kurang diminati.

Sejak teknologi Jepang berkembang pesat dan menghasilkan berbagai produk konsumerisme, seperti televisi, mobil, dan alat elektronik mengakibatkan produk negara lain menjadi sulit diterima di pasar Jepang. Kepercayaan pada kualitas produk dalam negeri membuat produk negara lain sulit masuk ke pasar Jepang. Ini diketahui dari persentase pertumbuhan ekspor dan impor Jepang yang tidak seimbang dari tahun 1980 hingga 1985 yaitu 47.5 persen dan 6.9 persen.³⁶

³⁶ Nakamura, Takafusa. *The Postwar Japanese Economy : The Development and Structure 1937 - 1994*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995). hlm 238.

Ekspor Jepang lebih besar daripada impor sehingga memengaruhi permintaan dalam negerinya yaitu permintaan dalam negeri menjadi turun dari tahun 1975-1980 sebesar 21.8 persen menjadi 17.7 persen pada tahun 1980-1985.³⁷ Perbandingan yang tidak seimbang ini mengakibatkan neraca perdagangan Jepang menjadi surplus dari tahun 1981 hingga 1985, yaitu 5,934 milyar dolar, 9,135 milyar dolar, 24,232 milyar dolar, 37,015 milyar dolar, dan 55,019 milyar dolar.³⁸ Surplus neraca perdagangan tersebut menguntungkan pemerintah dari segi devisa sektor industri manufaktur.

Peningkatan ekspor Jepang berasal dari peningkatan investasi, teknologi dan produktivitas. Investasi kepada sektor industri digunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan, dan menambah atau mengganti aset produksi non-tenaga kerja seperti peralatan, proyek baru, dan biaya produksi produk baru. Usaha ini dapat memajukan teknologi dan mendorong tingkat produktivitas industri sebagai cara untuk meningkatkan jumlah produk ekspor. Aliran investasi juga memengaruhi tingkat simpanan institusi keuangan Jepang. Pemerintah memberikan dana investasi melalui institusi keuangan yang kemudian diberikan kepada berbagai sektor yang ada di Jepang. Ini memengaruhi tingkat simpanan institusi keuangan, pemerintah, dan berbagai sektor lainnya. Keseimbangan antara tingkat simpanan dan investasi pada berbagai sektor selama paruh pertama tahun 1980-an dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Persentase Keseimbangan Simpanan-Investasi Jepang

Sektor	1979-1981	1982-1984
Korporasi Nonkeuangan	-5.7	-4.1
Institusi Keuangan	0.2	0.1
Pemerintahan	-4.1	-2.7
Korporasi Swasta Non-Profit	0.2	0.2
Sektor Rumah Tangga	13.3	8.6
Sektor Swasta	3.6	4.5

Sumber : Nakamura, Takafusa. *The Postwar Japanese Economy : The Development and Structure 1937 - 1994*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995). hlm 250.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Economic Survey of Japan 1988-1989, op.cit.*, hlm 4

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa keseimbangan simpanan pemerintah Jepang mengalami peningkatan karena adanya surplus perdagangan Jepang. Akan tetapi, jumlah surplus tersebut tidak mengakibatkan simpanan pemerintah melebihi dana investasi karena dana yang dimiliki diberikan kepada sektor swasta sebagai investasi. Hal tersebut tidak terjadi pada sektor rumah tangga dan institusi keuangan karena mengalami penurunan keseimbangan simpanan-investasi dan jumlah simpanannya masih surplus daripada dana investasi. Institusi keuangan menerima aliran dana dari pemerintah dan mendistribusikan kepada sektor swasta untuk mengembangkan usahanya. Hal ini membuat simpanan institusi keuangan tetap surplus. Investasi pada sektor rumah tangga tidak banyak tetapi kebiasaan masyarakat Jepang dalam menabung menjadikan simpanannya tetap surplus. Untuk sektor luar negeri terjadi investasi besar-besaran, tetapi dana simpanan yang dimiliki defisit pada paruh pertama 1980-an karena digunakan untuk pengembangan teknologi dan perluasan usaha di luar Jepang. Proses aliran dana investasi dan simpanan pada seluruh sektor di Jepang ternyata memiliki tingkat dana simpanan yang tidak merata dari akhir 1970-an hingga paruh pertama 1980-an, karena kelebihan simpanan hanya terjadi pada sektor luar negeri, institusi keuangan, sektor rumah tangga, organisasi swasta non profit, dan terutama sektor swasta.

Kemajuan sektor industri dan surplus simpanan berbagai sektor menunjukkan membaiknya ekonomi Jepang. Keadaan ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri Jepang pada masa paruh pertama 1980-an seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jepang Pada Paruh Pertama 1980-an

Tahun	Pendapatan Nasional perkapita (JutaYen)	PDB (%)	PNB (%)	Pajak pendapatan (%)	Pertumbuhan tenaga Kerja (%)
1981	2.262	2.9	3.3	26.0	66.8
1982	2.695	2.7	3.2	26.4	67.1
1983	2.692	1.6	3.7	26.9	67.4
1984	2.863	3.1	5.1	26.9	67.2
1985	3.087	5.1	4.5	27.3	66.9

Sumber : [www. OECD.org/Japan](http://www.OECD.org/Japan)

Usaha pemulihan ekonomi setelah resesi *endaka* dan krisis minyak telah memulihkan ekonomi Jepang pada paruh pertama 1980-an. Pendapatan Nasional Jepang pada Tabel 2.3 menunjukkan kenaikan yang cukup jauh selama paruh pertama 1980-an. Hal ini karena Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri, termasuk luar negeri persentasenya pernah menurun di tahun 1983, tetapi kembali naik pada tahun 1984 dan 1985. Selain itu, Produk Nasional Bruto yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan penduduk memiliki pertambahan persentase yang banyak selama tiga tahun pertama pada tahun 1980-an, pada saat masa resesi *endaka*. Hal ini berakibat pada pajak pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja. Persentase tenaga kerja stabil selama paruh pertama, dan tidak menunjukkan penurunan yang drastis meskipun menurun satu persen pada tahun 1985. Kestabilan Tenaga Kerja tersebut memengaruhi pajak pendapatan yang diperoleh pemerintah Jepang pada tahun 1985. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang pada paruh pertama 1980-an meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi paruh pertama 1980-an juga didukung dengan data yang menyatakan bahwa sejak Februari 1983, perekonomian Jepang mulai pulih dengan permintaan domestik di sekitar pertengahan tahun dan mencapai tingkat pertumbuhan 3.0 persen pada tahun 1983.³⁹ Ekspor (naik 5.8 persen dari tahun sebelumnya) dan produksi industri juga dipercepat, tumbuh 3.6 persen dari tahun sebelumnya (selisih 0.3 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun 1982). Harga bahkan lebih stabil daripada tahun 1982, harga grosir turun 2.2 persen dan harga konsumen naik 1.9 persen dari tahun sebelumnya.⁴⁰ Penurunan harga grosir sebagian besar disebabkan karena penurunan harga produk manufaktur di tingkat internasional. Peningkatan harga konsumen disebabkan karena harga barang dalam negeri lebih mahal yang dipengaruhi rendahnya rata-rata nilai tukar Yen terhadap Dolar dari tahun 1982-1983 senilai 240.08 yen, dan 237.51 yen. Hal ini juga merupakan salah satu sebab dari sulitnya produk negara lain masuk ke pasar Jepang.

Perekonomian Jepang paruh pertama tahun 1980-an dapat dikatakan stabil dan meningkat pesat hingga skala internasional. Pertumbuhan ekonomi yang

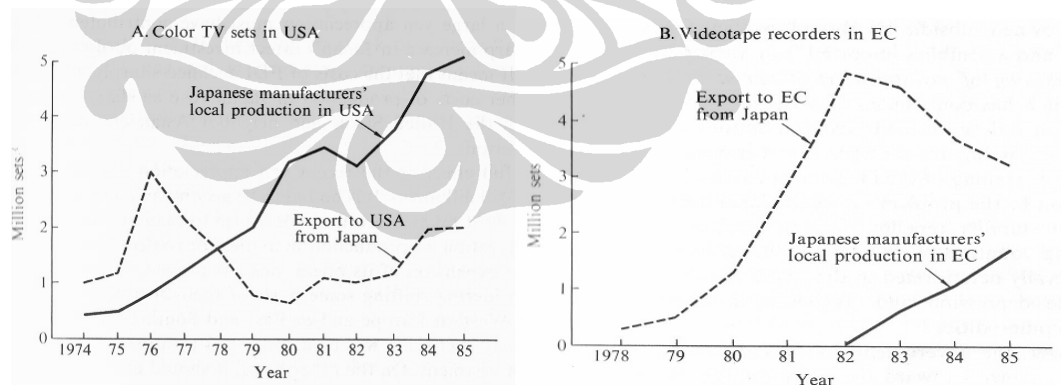
³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

stabil mengakibatkan sektor industri Jepang diperluas hingga ke negara lain, baik ekspor maupun investasi secara langsung di beberapa negara. Hal ini berpengaruh pada neraca perdagangan yang dicapai Jepang selama paruh pertama tahun 1980-an yang mencapai surplus. Hasil perdagangan yang dicapai Jepang tersebut menjadi masalah bagi negara-negara maju lainnya. Masalah ini memengaruhi hubungan ekonomi Jepang dengan negara maju lainnya dan keadaan ekonomi Jepang selama tahun 1980-an.

2.2 Keadaan Ekonomi Internasional Pada Paruh pertama 1980-an

Kemajuan ekonomi Jepang pada paruh pertama 1980-an merupakan bagian dari partisipasi Jepang dalam ekonomi dunia Internasional. Partisipasi yang diberikan adalah perdagangan antarnegara. Perdagangan itu mengakibatkan ekspor Jepang surplus dan menguntungkan bagi Jepang dalam anggaran negara. Keadaan perdagangan yang menguntungkan tersebut, membuat negara dunia internasional di antaranya Eropa (kecuali Jerman Barat) dan Amerika sebagai negara yang memiliki kekuasaan penuh dalam perekonomian menjadi tersaingi dengan membanjirnya produk Jepang di negaranya.⁴¹ Beberapa produk Jepang yang telah beredar di negara Eropa dan Amerika, dapat dilihat pada Grafik 2.3 di bawah ini.



Grafik 2.6 Jumlah Ekspor Produk Elektronik Ke Amerika dan Eropa

Sumber : Komiya, Ryutaro. *The Japanese Economy : Trade, Industry and Government*. (Tokyo: University of Tokyo Press, 1993). Hlm 129.

⁴¹ Pada saat itu perdagangan Jerman Barat juga surplus.

Jepang menguasai pasar Amerika dengan produk televisi berwarna baik melalui ekspor maupun pendirian pabrik di negara tersebut. Sama halnya dengan alat perekam video (*Videotape recorder*) yang dapat masuk ke pasar Eropa dengan pendirian pabrik di negara-negara Eropa, meskipun ekspor pada paruh pertama tahun 1980-an mengalami penurunan. Tidak hanya produk elektronik tetapi juga sepeda motor, mobil, pertanian, semikonduktor, baja, dan peralatan mesin yang diproduksi dan dipasarkan di Amerika maupun Eropa, mengalahkan produk mobil buatan Amerika dan Eropa.

Meluasnya produk Jepang memengaruhi pemasaran produk Amerika dan Eropa di negaranya sendiri. Produk Eropa dan Amerika tidak dapat menguasai pasar sehingga mengakibatkan ekspornya lebih sedikit daripada impor. Defisit perdagangan dialami negara-negara Eropa dan Amerika. Pertumbuhan ekspor Amerika pada tahun 1981-1984 menurun sebesar 13.7 persen dan pertumbuhan impor naik sebesar 31.8 persen.⁴² Penurunan tersebut berpengaruh pada keseimbangan neraca pembayaran yaitu menurun dari tahun 1978-1981 sebesar 396 milyar dolar menjadi 1982-1985 sebesar -959 milyar dolar.⁴³ Selain itu, keseimbangan pendapatan pemerintah Amerika juga menurun dari tahun 1978-1982 sebesar -603 milyar dolar menjadi -1.834 milyar dolar.⁴⁴ Kondisi ini mengakibatkan terjadinya friksi perdagangan antara Jepang dengan negara Eropa serta Amerika.

Selain karena peningkatan perdagangan Jepang, friksi perdagangan juga disebabkan oleh nilai tukar Yen. Nilai tukar Yen terhadap Dolar dan mata uang asing lainnya jatuh. Rata-rata nilai tukar yen terhadap dolar dari tahun 1983 hingga 1985 adalah 237.51 yen, 237.52 yen, dan 238.54 yen⁴⁵. Nilai Yen merosot terus sehingga harga produk Jepang menjadi murah bagi negara lain. Hal ini membuat harga produk ekspor Jepang juga murah dan diminati oleh negara lain. Disisi lain, produk negara lain menjadi lebih mahal.

⁴² *Ibid.*, 172

⁴³ Nakamura, Takafusa, *op. cit.*, hlm 249

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *The MIT Encyclopedia of Japanese Economy. op.cit.*, hlm 496

Segi fiskal, menurunnya nilai Yen tidak menguntungkan bagi Jepang karena akan dibutuhkan lebih banyak Yen dalam membeli produk impor. Kebutuhan Yen tersebut dipenuhi oleh keuntungan jumlah ekspor yang meningkat dan keuntungan nilai tukar mata uang asing terhadap Yen, diikuti dengan meningkatnya investor. Keuntungan tersebut dihasilkan dari permintaan Yen di pasar nilai tukar mata uang. Karena suku bunga rendah mendukung peningkatan permintaan Yen di pasar valuta asing. Suku bunga Jepang lebih rendah daripada negara Eropa dan Amerika, maka investor Jepang menggunakan kesempatan ini untuk berinvestasi di negara tersebut. Investasi ini meningkatkan pasokan Yen di pasar valuta asing, karena investor Jepang mengubah mata uang asing (terutama dolar) menjadi Yen untuk berinvestasi di luar negeri. Secara tidak langsung hal ini menambah volume Yen dalam pasar valuta asing sehingga memengaruhi pendapatan investor dari hasil berinvestasi tersebut. Pemerintah pun merasakan dampaknya dengan mengalirnya dana ke luar negeri dalam Yen, yaitu dalam tingkat persediaannya.

Rendahnya nilai Yen, meningkatnya simpanan institusi keuangan, dan surplus perdagangan Jepang mengakibatkan timbulnya friksi perdagangan dengan negara Eropa dan Amerika. Nilai Yen rendah menarik investor Jepang untuk berinvestasi langsung di negara barat. Keadaan ini menguntungkan dalam jumlah persediaan mata uang Yen Jepang tetapi tidak bagi negara barat yang nilai mata uangnya meninggi. Perdagangan di negara Barat pun mengalami hambatan karena pemasaran produk Jepang. Negara-negara tersebut tidak dapat bersaing dengan produk Jepang di negaranya. Akibatnya, produksi industri pada negara-negara tersebut menjadi terhambat dan memengaruhi neraca pembayaran. Neraca pembayaran Eropa dan Amerika menjadi tidak seimbang. Untuk memulihkan keadaan ekonomi pada negara-negara tersebut diperlukan pembukaan pasar Jepang untuk produk asing di Jepang dan Jerman Barat.

2.3 Keadaan Akhir Ekonomi Jepang pada Paruh Pertama 1980-an

Akhir perekonomian Jepang paruh pertama 1980-an dihadapkan dengan penyelesaian keadaan ekonomi internasional pada paruh pertama 1980-an. Penyelesaian tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang pada paruh

pertama sehingga Jepang pun memasuki ekonomi pada paruh kedua 1980-an, yang merupakan *bubble economy*. Perekonomian Jepang pada paruh kedua 1980-an mengalami perubahan yang cukup berbeda dari paruh pertama 1980-an. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh berbagai faktor yang mengakhiri perekonomian paruh pertama, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, yaitu perjanjian internasional dan regulasinya. Faktor internal, yaitu kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah Jepang, perilaku ekonomi pada perusahaan dan institusi keuangan, dan deregulasi untuk internasionalisasi dalam keamanan produk keuangan dan keberagaman jasa keuangan.

2.3.1 Perjanjian Internasional dan Regulasinya

Sejak Jepang menjadi bagian dunia internasional maka Jepang harus menyelesaikan masalah ekonomi paruh pertama dalam skala internasional. Ada beberapa perjanjian Internasional yang disepakati Jepang dengan negara lain dan Jepang harus mematuhi beberapa regulasi yang ditetapkannya. Sebagian besar regulasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Amerika dalam lingkup ekonomi dunia internasional. Perjanjian pertama adalah perjanjian melalui pertemuan GATT pada tahun 1984 dengan perjanjian *Section 301*.⁴⁶ Negara Eropa (kecuali Jerman Barat) dan Amerika menetapkan keputusan perjanjian GATT. Keputusan ini mengutamakan proteksi produk dalam negeri dari pengaruh produk Jepang dan pengurangan tarif impor negara-negara tersebut pada produk hasil pertanian, mobil, motor, elektronik, peralatan mesin, produk pertanian, dan industri baja. Hal ini juga bertujuan untuk membantu masuknya impor negara Eropa dan Amerika ke pasar Jepang. Keseluruhan keputusan tersebut ditetapkan dalam pelaksanaan langkah-langkah ekonomi yang diputuskan pada April 1984, yaitu :

1. Pengurangan atau penghilangan tarif pada 76 item produk impor (termasuk anggur dan produk kertas), dan untuk melakukan implementasinya dilanjutkan dengan (dua tahun untuk produk industri dan satu tahun untuk barang-barang

⁴⁶ GATT (*General Agreement Tariffs and Trade*) adalah pertemuan negara industri maju yang didirikan pada tahun 1949 di Geneva, Switzerland dan bertujuan untuk mengendalikan tarif dan produk yang diperdagangkan antar negara anggota, Jepang menjadi anggota GATT sejak tahun 1955. Artikel VI berisi tentang Section 301 berisi tentang pembukaan pasar produk impor negara-negara anggota.

- pertanian) penurunan tarif yang telah dijadwalkan pada *Tokyo Round Agreements*.⁴⁷
2. Pengurangan pembatasan impor daging sapi, buah jeruk, dan item lainnya (termasuk liberalisasi impor produk diolah atau diawetkan, seperti daging babi dan jus buah tropis).
 3. Liberalisasi impor produk tembakau dan peningkatan distribusinya.
 4. Peningkatan standar mutu produk dan sistem sertifikasi
 5. Pengembangan impor barang-barang manufaktur.
 6. Pembukaan pasar sektor teknologi tinggi seperti buatan asing telekomunikasi satelit dan bisnis telekomunikasi lainnya.
 7. Liberalisasi keuangan dan pasar modal dan internasionalisasi Yen.
 8. Pengembangan investasi lintas negara.⁴⁸

Sebagian besar dari isi pelaksanaan diatas mengarah kepada pembukaan pasar Jepang terhadap produk barat. Khususnya, untuk pelaksanaan langkah ke delapan yang bertujuan untuk memengaruhi mata uang Jepang dan mengarah pada perjanjian Plaza (*Plaza Accord*).

Proses pengurangan friksi ekonomi dengan negara Barat masih berlanjut melalui perjanjian kedua yaitu pertemuan G-5 (Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman Barat). Pada saat itu Menteri Keuangan Jepang, Kiichi Miyazawa,⁴⁹ menyetujui perjanjian *Plaza Accord* yang dilaksanakan di Hotel Plaza, New York. Salah satu penandatanganan *Plaza Accord* pada tanggal 22 September 1985 adalah Gubernur Bank Sentral Jepang.⁵⁰ Perjanjian tersebut mengatasnamakan G-5 yang bertujuan untuk melakukan depresiasi⁵¹ terhadap *Dolar, Franc, dan Poundsterling*. Depresiasi dilakukan melalui intervensi terhadap pasar mata uang yen dan mata uang Jerman Barat, yaitu *Mark*. Isi perjanjian tersebut adalah nilai tukar Yen ditetapkan 240 Yen terhadap Dolar,

⁴⁷ *Tokyo Round Agreement* adalah salah satu bagian perjanjian GATT pada November 1971 yang berisi tarif perdagangan yang dikenakan pada produk manufaktur dan pertanian.

⁴⁸ Yamamura, Kozo. *Japan's Economic Structure: Should It Changes*. (US : Society of Japanese Studies, 1990). hlm 125

⁴⁹ Kiichi Miyazawa adalah menteri keuangan periode 1985-1988 yang menekankan rencana ekonomi penggandaan aset (*Asset Doubling*).

⁵⁰ Gubernur Bank Sentral Jepang adalah Sumita Satoshi pada periode 1984-1989.

⁵¹ Depresiasi adalah penyusutan nilai mata uang

ekspor Jepang harus dikurangi, sebagai gantinya mengalihkannya kepada pasar dalam negeri⁵² Selain itu, menetapkan Ibukota Jepang, Tokyo, sebagai pusat perekonomian internasional.

Saat perjanjian *Accord* disepakati, para menteri keuangan negara anggota menyetujui pelaksanaan isi perjanjian. Penerapan isi perjanjian dilakukan pada masing-masing negara anggota dalam rangka membuka pasar dalam negeri masing-masing untuk perdagangan internasional dan memperbaiki ketidakseimbangan anggaran pemerintah yang mengalami defisit. Untuk pelaksanaan perjanjian tersebut Jepang menerapkan beberapa cara mengenai peningkatan permintaan domestik dan pengendalian pertumbuhan inflasi. Cara yang dilakukan adalah menyediakan akses penuh ke pasar domestik bagi barang asing, dan meliberalisasi Yen dalam pasar modal dalam negeri. Cara tersebut diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian *Accord* untuk Jepang yaitu :

1. Pertahanan proteksi produk Barat dengan membuka pasar domestik Jepang bagi barang dan jasa luar negeri.
2. Pemanfaatan penuh sektor swasta melalui pelaksanaan langkah-langkah deregulasi.
3. Pengelolaan kebijakan moneter dengan tetap memerhatikan tingkat Yen.
4. Peningkatan pelaksanaan liberalisasi pasar keuangan dan Yen, sehingga Yen sepenuhnya mencerminkan kekuatan yang mendasari ekonomi Jepang.
5. Pemfokusan fiskal pada tujuan ganda yaitu mengurangi defisit pemerintah pusat dan menyediakan lingkungan yang pro pertumbuhan bagi sektor swasta. Menurut kerangka tersebut, pemerintah daerah mungkin mendapatkan Keuntungan dengan perizinan untuk melakukan investasi tambahan pada tahun 1985, juga mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.
6. Perangsangan permintaan domestik yang berfokus pada peningkatan konsumsi swasta dan investasi dengan memperbesar jumlah konsumen dan pasar kredit hipotek.⁵³

⁵² Hsu, Robert.C.*op.cit.*, hlm 51.

Beberapa bagian dari pelaksanaan *Plaza Accord*, disetujui oleh Jepang untuk merangsang ekonomi dalam rangka meningkatkan permintaan domestik bagi produk Barat.

Plaza Accord, mengawali proses konsultasi internasional yang juga melahirkan perjanjian kedua yaitu kesepakatan Miyazawa-Baker pada Oktober 1986, di San Fransisco, Amerika Serikat. Kesepakatan antara Menteri Keuangan Amerika, James A. Baker, dengan Kiichi Miyazawa menghasilkan kesepakatan Miyazawa-Baker. Kesepakatan ini memengaruhi kebijakan ekonomi Jepang secara langsung. Isi kesepakatan Miyazawa-Baker menyatakan bahwa untuk menstabilkan nilai Dolar terhadap Yen maka Jepang perlu menyetujui pengurangan suku bunga pinjaman Bank Sentral Jepang terhadap bank pemberi pinjaman (Bank Perkreditan) kepada masyarakat. Pengurangan suku bunga mencapai 3 persen dengan berturut-turut pengurangan selama satu tahun.⁵⁴ Selain itu, diharapkan Jepang memberikan dana stimulus lebih banyak terhadap sektor swasta untuk meningkatkan permintaan dalam negeri.

Setelah *Plaza Accord* dan kesepakatan Miyazawa-Baker, pengaruh negara Barat terhadap perekonomian Jepang belum berhenti. Ekonomi Jepang kembali dipengaruhi dengan perjanjian internasional ketiga, yaitu perjanjian *Louvre* (*Louvre Accord*). Perjanjian *Louvre Accord* dilaksanakan di Louvre, Paris pada 21 Februari 1987. Perjanjian ini dihadiri oleh negara-negara G-7 (Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Kanada, dan Italia).⁵⁵ Perwakilan masing-masing negara dalam perjanjian tersebut adalah para gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan. Gubernur Bank Sentral Jepang, Sumita, berperan kembali dalam kesepakatan perjanjian *Louvre*. Kesepakatan perjanjian ini berisi cara mempertahankan stabilitas nilai Dolar dan pertumbuhan non inflasi dalam harga barang. Karena depresiasi Dolar terhadap Yen maka ditetapkan langkah untuk menstabilkan nilai tukar Dolar. Pada saat itu nilai tukar Yen terhadap Dolar tidak

⁵³ Kredit hipotek adalah kredit yang menggunakan jaminan benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, bangunan dan lainnya dalam suatu kesepakatan kredit. www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm

⁵⁴ Grimes, William. *Unmaking The Japanese Miracle : Macreconomic 1985-2000*. (US : Cornell University Press, 2001). hlm122.

⁵⁵ Italia tidak hadir pada saat penandatanganan kesepakatan karena Menteri Keuangan Italia tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut maka perjanjian hanya dihadiri oleh enam negara atau disebut G-6.

diumumkan, tetapi beberapa hari setelah perjanjian nilai Yen terhadap Dolar adalah 153 yen per Dolar dan terjadi pengurangan bunga pinjaman bank menjadi 2.5 persen.⁵⁶ Perjanjian *Louvre* merupakan kesepakatan Jepang dengan negara Barat untuk melaksanakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan permintaan domestik. Kebijakan itu mengakibatkan pengurangan surplus ekspor perdagangan Jepang.

Jadi, keseluruhan perjanjian internasional yang dihadapi Jepang merupakan intervensi negara Barat terhadap kebijakan ekonomi Jepang. Negara G-5 menginginkan Jepang menurunkan tarif impor dengan cara menurunkan nilai mata uang Amerika, Prancis, dan Inggris. Perjanjian Miyazawa-Baker dan *Louvre Accord* mengandung komitmen Jepang untuk menurunkan suku bunga pinjaman.

2.3.2 Kebijakan Ekonomi yang Diterapkan Pemerintah Jepang

Pejanjian internasional adalah upaya negara barat memengaruhi kebijakan ekonomi Jepang. Pihak Barat menyarankan adanya stimulus ekonomi pada permintaan domestik dengan cara mengurangi simpanan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, tingkat investasi, dan nilai Yen. Pengaruh kebijakan tersebut diabaikan oleh Jepang karena tidak inginnya mendapat pengaruh dari negara Barat. Akan tetapi, pengaruh Barat telah menimbulkan tekanan pada pemerintah dalam negeri Jepang untuk menerapkan kebijakan yang tepat.

Menanggapi tekanan dari luar negeri dan dalam negeri, Perdana Menteri Yasuhiro Nakosone⁵⁷ pada tahun 1985 membentuk Komite Penasehat Pengatur Struktur Ekonomi untuk Keharmonisan Internasional (*Advisory Group on Economic Structural Adjustment for International Harmony*) yang lebih dikenal dengan *Maekawa Committee* karena dikepalai oleh mantan Gubernur Bank Sentral Jepang yaitu Haruo Maekawa.⁵⁸ Komite ini terdiri dari 17 penasehat yang bertujuan mempelajari penerapan kebijakan ekonomi untuk pengaturan struktur ekonomi Jepang yang disesuaikan dengan perubahan ekonomi dunia. Komite ini

⁵⁶ *Ibid.*, hlm124.

⁵⁷ Perdana Menteri Jepang periode 1982-1987 yang terkenal dengan kebijakan privatisasi perusahaan pemerintah dari *Japan National Railways* menjadi *Japan Railways Group*.

⁵⁸ Gubernur Bank Sentral Jepang periode 1979-1984

mempelajari masalah ekonomi yang terjadi selama setengah tahun dan mengeluarkan laporan hasil penelitian yang dipublikasikan pada April 1986 yang disebut *Maekawa Report*. Hasil laporan itu dibagi dalam enam aspek rekomendasi komite yang terdiri dari aspek dalam negeri dan luar negeri, yaitu:

1. Permintaan dalam negeri seharusnya ditingkatkan dalam bentuk perumahan dan pembaruan perkotaan, konsumsi pribadi, dan investasi publik lokal.
2. Struktur industri disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia untuk mendorong divisi tenaga kerja internasional. Untuk tujuan ini investasi langsung luar negeri ditingkatkan dan kebijakan pertanian seharusnya mengadopsi kebijakan pintu terbuka (*open-door policy*).
3. Usaha mendorong impor produk manufaktur dengan meningkatkan akses pasar dan mengubah perilaku khusus sektor swasta.
4. Nilai tukar harus tetap stabil dan fluktuasi, keuangan dan pasar modal seharusnya menjadi liberal dalam proses memfasilitasi internasionalisasi Yen pada skala global.
5. Jepang seharusnya melakukan kontribusi terhadap kerjasama internasional sebagai contoh meningkatkan impor dari negara berkembang dan menerapkan hasil dari perjanjian GATT.
6. Pengaturan kebijakan fiskal dan moneter. Ketergantungan pada defisitnya keuangan saham seharusnya dapat diperbaiki. Pembatasan nilai pajak untuk mengurangi simpanan pemerintah Jepang. Dan Kebijakan moneter harus dikelola untuk membentuk peningkatan permintaan dalam negeri.⁵⁹

Keseluruhan laporan Maekawa (*Maekawa Report*) diterima dengan baik oleh berbagai pihak. Ketika laporan tersebut dipersiapkan, nilai Yen sedang tinggi dan menekan industri ekspor Jepang. Maka, diperlukan perubahan kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Peningkatan permintaan dalam negeri berperan penting menggeser perekonomian Jepang dari dominasi ekspor ke permintaan pasar dalam negeri. Untuk menerapkan kebijakan ini, pemerintah

⁵⁹ Ishi, Hiromitsu. *Making Fiscal Policy in Japan : Economy Effects and Institutional Settings*. (New York : Oxford University, 2000). hlm 66-67.

mengimplementasikan rekomendasi *Maekawa Report* yang diumumkan dalam deklarasi konferensi Kementerian Keuangan untuk penerapan langkah-langkah ekonomi dibagi menjadi enam bagian, yaitu :

1. Kefleksibelan manajemen kebijakan ekonomi.
2. Pengembangan pengerjaan proyek publik.
3. Penerimaan keuntungan dari meningkatnya nilai Yen, rendahnya harga minyak, dan pengaturan harga yang sesuai.
4. Pengembangan ulang daerah perkotaan dengan mengurangi pengetatan peraturan yang berlaku.
5. Pengembangan konstruksi perumahan dan investasi sektor modal swasta.
6. Mengembangkan perusahaan kecil dan menengah.⁶⁰

Selain dari keenam implementasi di atas pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan permintaan dalam negeri dan mengurangi pertumbuhan inflasi. Pemerintah Jepang harus memberikan dana stimulus melalui kebijakan uang longgar (*easy money policy*) kepada sektor swasta, institusi, dan sektor rumah tangga atau individu agar dapat memiliki modal untuk membeli produk asing yang akan masuk di pasar Jepang. Kebijakan ini dilaksanakan melalui bank maupun institusi keuangan atas persetujuan dari Gubernur Bank Sentral Jepang, Sumita. Persetujuan juga diberikan oleh Menteri Keuangan Jepang yang menghadiri pertemuan *Plaza Accord*.

Keseluruhan implementasi kebijakan pemerintah telah membawa perubahan dalam struktur perekonomian Jepang. Perekonomian Jepang diarahkan pada konteks ekonomi internasional. Pengembangan pemikiran ekonomi yang dipengaruhi pemikiran ekonomi negara Barat diterapkan pada implementasi laporan *Maekawa* sehingga Jepang memasuki masa pengaturan struktural ekonomi Jepang.

2.3.3 Perilaku Ekonomi pada Sektor Industri dan Institusi Keuangan

Sejak diberlakukan kebijakan peningkatan permintaan domestik, keadaan nilai Yen tetap tinggi mengakibatkan perubahan perilaku ekonomi pada sektor

⁶⁰ *Ibid.*,

industri dan institusi keuangan. Perubahan perilaku diawali dari pemberian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi sektor industri dan institusi keuangan. Peningkatan ekonomi dilakukan dengan investasi besar-besaran pada teknologi dan pengembangan institusi keuangan. Bagi sektor industri investasi ini adalah investasi modal tinggi, dan bagi institusi keuangan merupakan resiko peminjam yang ditanggung institusi tersebut. Institusi keuangan menyatakan hal itu karena dana stimulus yang diberikan pemerintah dipinjamkan kepada pihak lain seperti, bank pemberi kredit, perusahaan, maupun individu. Jika individu maupun perusahaan tidak dapat mengembalikan maka resiko merugi akan dialami oleh institusi keuangan.

Bagi sektor industri, modal besar yang didapatkan dari pemerintah tidak hanya digunakan untuk pengembangan teknologi tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan berlipat dari modal yang ada. Modal pun digandakan di pasar saham dengan cara membeli saham dan kemudian menjual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya (*Capital Gain*).⁶¹ Keuntungan yang didapatkan sektor industri digunakan lagi untuk hal yang sama. Hal ini memicu institusi keuangan lebih memilih meminjamkan kepada perusahaan yang berhubungan dengan saham dan *real estate*. Kedua aset tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman perusahaan maupun individu untuk mendapatkan keuntungan.

2.3.4 Deregulasi untuk Internasionalisasi dalam Keamanan Produk Keuangan dan Keberagaman Jasa Keuangan

Sehubungan dengan hasil *Maekawa Report* bahwa untuk memfasilitasi internasionalisasi Yen pada skala global, keuangan dan pasar modal harus menjadi liberal. Karena itu pemerintah melakukan deregulasi produk keuangan. Deregulasi dilakukan dengan cara diversifikasi produk keuangan. Produk keuangan yang dikeluarkan pemerintah semakin beragam antara lain sertifikat deposito, saham baru, dan berbagai surat obligasi yang baru.⁶² Surat obligasi baru dikeluarkan untuk

⁶¹ *Capital Gain* adalah selisih harga dari penjualan saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli.

⁶² Sertifikat Deposito adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain ke investor.

mendanai proyek publik milik pemerintah dan transaksi. Surat saham dikeluarkan dengan tujuan agar investor asing dapat masuk ke pasar uang Jepang dan ikut bergabung dalam transaksi perdagangan produk keuangan tersebut. Karena investor asing menggunakan nilai tukar mata uang Yen sebagai transaksi maka Yen dapat diperjualbelikan dengan mudah secara internasional.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga mendukung deregulasi tersebut. Tahun 1984, diberlakukan pembukaan pasar transaksi keuangan dengan penghapusan pembatasan nilai konversi Yen terhadap Dolar, maupun mata uang Eropa. Pada bulan Juli tahun yang sama, Kementerian Perdagangan mengeluarkan pembatasan untuk penumpukan obligasi-obligasi dengan nilai Yen menurut kepentingan-kepentingan luar negeri. Selain itu, adanya pembukaan pasar modal baru telah membuktikan respon Jepang yang baik terhadap investor asing, seperti Pasar Surat Komersil (*Commercial Paper Market / CP*) pada November 1987 yang merupakan pasar untuk pinjaman bagi bank dan perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan tinggi, Pasar Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bill Market*) merupakan pasar untuk pengembangan obligasi pemerintah jangka pendek dibuka pada Februari 1986 berdasarkan rekomendasi dari Komite Yen-Dolar, dan Pasar Luar Negeri Jepang (*Tokyo Offshore Market*) pada Desember 1986 adalah pasar keuangan bagi bank asing yang tidak ada di Jepang. Pembukaan pasar uang ini mendukung peningkatan permintaan domestik pada produk jasa keuangan.

Pembukaan pasar keuangan baru dan deregulasi penerbitan produk keuangan baru telah berlangsung sejak perekonomian Jepang pada akhir paruh pertama 1980-an. Keadaan ini membuka kesempatan bagi masyarakat dan investor asing untuk ikut serta bertransaksi dalam pasar keuangan baru tersebut. Dengan demikian, Jepang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi negara Barat. Hal ini telah membuat perekonomian Jepang termasuk nilai tukar Yen menjadi terinternasionalisasi, yang memengaruhi keadaan ekonomi Jepang pada masa paruh kedua 1980-an.

Obligasi adalah surat yang berisi perjanjian antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Obligasi pada masa ini sebagian besar diterbitkan untuk membiayai proyek pemerintah.

BAB 3

Masa *Bubble Economy* Jepang

3.1 Keadaan yang Mendukung *Bubble Economy*

Memasuki paruh kedua tahun 1980-an, ekonomi Jepang mengalami perubahan. Perubahan ditandai dengan perjanjian Internasional serta kebijakan pemerintah yang menentukan perekonomian Jepang. Penerapan kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh regulasi dunia telah berdampak pada perekonomian Jepang. Perekonomian dalam negeri semakin maju dan investasi semakin banyak mengalir ke berbagai sektor industri, maupun pelaku ekonomi. Kondisi ini memicu spekulasi harga dan kenaikan harga aset pada paruh kedua 1980-an, yang menunjukkan bahwa Jepang memasuki *bubble economy*. Di saat *bubble economy* terjadi ada beberapa keadaan yang mendukung memuncaknya *bubble economy*. Keadaan yang mendukung terjadinya *bubble economy*, yaitu Yen tinggi, dan aliran dana.

3.1.1 Yen Tinggi (*Endaka*)

Penandatanganan perjanjian Plaza di Hotel New York, Amerika, tahun 1985 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Jepang telah mengubah keadaan ekonomi Jepang secara bertahap. Jepang harus menyetujui beberapa kesepakatan mengenai penetapan nilai tukar Yen dengan tujuan peningkatan ekonomi dalam negeri dan penurunan jumlah ekspor produk Jepang. Hal ini karena nilai tukar Yen berperan mengendalikan kondisi ekonomi dalam negeri Jepang.

Perjanjian tersebut menetapkan nilai tukar Yen untuk tetap menguat terhadap Dolar sehingga nilai Yen mengalami apresiasi atau *endaka*.⁶³ Karena Yen yang menguat atau tinggi akan membawa keuntungan bagi negara lain yaitu harga ekspor dan impor yang disesuaikan dengan Dolar menjadi menurun sehingga berakibat pada jumlah ekspor dan impor semakin bertambah. Sedangkan harga impor dan ekspor dalam Yen menjadi naik sehingga berakibat jumlah impor

⁶³ Apresiasi Yen adalah meningkatnya nilai tukar Yen terhadap mata uang asing lain, di Jepang terjadi pertama kali pada tahun 1977 hingga 1980.

dan ekspor dalam Yen berkurang. Keadaan tersebut menjadi masalah bagi perdagangan Jepang yang menggunakan mata uang Yen dalam bertransaksi karena telah Jepang telah membuka pasar impor dan eksportnya bagi negara barat. Impor dari negara lain dapat masuk meningkat, yaitu impor dari negara Eropa meningkat 3.5 kali lipat, dari Amerika 2 kali lipat, dari Kanada 1.8 kali lipat antara tahun 1985-1990.⁶⁴ Kenaikan harga impor dan ekspor dalam Yen memengaruhi harga konsumen dan harga grosir Jepang. Harga impor dalam Yen naik, maka biaya produksi harus dikurangi dan impor bahan baku juga harus dibatasi. Harga tersebut menentukan harga barang yang beredar dikonsumsi.

Maka, dapat dikatakan bahwa kenaikan nilai Yen membawa dampak bagi perekonomian Jepang, terutama sektor industri selama masa paruh kedua 1980-an. Kenaikan nilai tukar Yen terhadap Dolar dari tahun 1985 hingga 1990 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Tukar Yen terhadap Dolar

Tahun	Yen Akhir tahun	Rata-rata Yen
1984	251.58	237.52
1985	200.60	238.54
1986	160.10	168.03
1987	122.00	144.52
1988	125.90	128.20
1989	143.40	138.11
1990	135.40	144.88

Sumber: Hsu, Robert C. *The MIT Encyclopedia of Japanese Economy*. (London: The MIT Cambridge Press, 1999). hlm 496

Pada tahun 1985 nilai tukar Yen terhadap dolar ditetapkan secara internasional pada perjanjian *Plaza Accord* menjadi tinggi dari tahun sebelumnya yaitu, senilai 240 yen per dolar. Tiga bulan setelah perjanjian nilai tukar Yen terus meninggi hingga akhir tahun 1985, yaitu 214.73 yen per dolar, 203.72 yen per dolar, dan 200.60 yen per dolar. Tahun berikutnya, nilai Yen terhadap Dolar terus meninggi diawali pada bulan Januari sebesar 200.07 yen per dolar hingga akhir tahun mencapai nilai 160 yen per dolar. Tahun berikutnya, Yen tetap

⁶⁴ Nakao, Shigeo. *The Political Economy of Japan Money*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995). hlm 14.

meninggi, karena pemerintah menyetujui untuk menstabilkan nilai Dolar dengan *perjanjian Louvre*. Hasil perjanjian tidak diumumkan tetapi beberapa hari setelah perjanjian nilai Yen berada pada angka 153.50 yen per dolar hingga pada tahun 1988 mencapai angka tertinggi senilai 125 yen per dolar. Yen tidak selamanya meninggi tetapi kebijakan pemerintah telah membuat nilai tukar Yen terhadap Dolar menurun pada tahun 1989, nilai Yen jatuh dan mencapai nilai 143.40 yen per dolar hingga akhir tahun 1990.

3.1.2 Aliran Dana

Pemerintah melakukan aliran dana untuk memenuhi perjanjian di Plaza Accord dan mengimbangi dampak deflasi dari nilai yen yang meningkat. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dan moneter melalui Bank Jepang dan Menteri Keuangan Jepang. Kebijakan ekonomi tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan uang longgar, paket stimulus fiskal, dan investasi.

Aliran dana yang pertama adalah melalui penerapan kebijakan uang longgar (*policy easy money*). Pada tahun 1986 ditetapkan tarif resmi tingkat diskonto berturut-turut dengan diturunkan dari 5 persen pada 1983, 4,5 persen pada 30 Januari 1986, 4,0 persen 10 Maret 1986, 3,5 persen pada 21 April 1986, 3 persen 1 November 1986 dan menjadi 2,5 persen pada Februari 1987 yang berlaku hingga Mei 1989.⁶⁵ Tingkat diskonto diturunkan agar suku bunga pinjaman yang diberikan bank kepada masyarakat juga menurun. Hal ini memengaruhi jumlah uang beredar yang tumbuh lebih dari 10 persen pertahun, jauh lebih cepat dari PDB yang tumbuh antara 4,8 persen dan 5,9 persen antara 1987 dan 1989.⁶⁶ Aliran dana dari Bank diberikan berupa pinjaman dengan bunga rendah kepada sektor tertentu. Pinjaman dana yang paling besar diberikan pada beberapa sektor tertentu, data dapat dilihat pada Tabel 3.2

⁶⁵ Tingkat diskonto adalah bunga pinjaman yang diberikan Bank Jepang kepada Bank komersil atau swasta yang melakukan peminjaman kepada masyarakat dan perusahaan. Ishi, Hiromitsu. *op.cit.*, hlm 256.

⁶⁶ *Ibid.*,

Tabel 3.2 Tingkat Pinjaman Dana Dari Bank

	(¥ trillion)								
	Total	Manu- facturing	Const- ruction	Wholesale and retail	Finance insurance	Real estate	Service industry	Individual	Other
1980	134.6	43.0	7.3	34.4	4.4	7.6	9.2	15.2	13.5
85	222.8	58.2	12.7	49.2	16.8	17.2	23.6	20.6	24.5
89	355.1	59.1	19.2	63.1	36.7	41.0	51.3	54.1	30.6
91	385.7	60.0	21.6	64.3	36.1	44.7	60.3	65.0	33.7
Increase from 1985-89	132.8	0.9	6.5	13.9	19.9	23.8	27.7	33.5	6.1
	(100)	(0.7)	(4.9)	(10.5)	(15.0)	(17.9)	(20.9)	(25.2)	(4.6)
~equipment funding									
1980	36.7	7.2	0.6	3.4	0.4	2.0	4.2	12.9	6.0
85	53.5	8.5	0.9	4.9	2.5	4.6	7.9	17.0	7.2
89	115.8	12.1	3.4	11.9	6.9	17.0	19.9	39.6	5.0
91	140.7	14.7	4.5	14.5	10.6	18.1	26.9	47.8	3.6
Increase from 1985-89	62.3	3.6	2.5	7.0	4.4	12.4	12.0	22.6	-2.2
	(100)	(5.8)	(4.0)	(11.2)	(7.1)	(19.9)	(19.3)	(36.3)	(-3.5)

Sumber: Nakamura, Takafusa. *The Postwar Japanese Economy : The Development and Structure 1937-1994*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995). hlm 265

Antara tahun 1985-1989 terjadi peningkatan pinjaman yang cukup besar pada sektor keuangan dan asuransi, *real estate*, industri jasa, dan perseorangan atau individu. Keempat sektor tersebut dijumlahkan menjadi 83 persen pada pertumbuhan pinjaman. Seiring persentase tingkat pertumbuhan pinjaman individu sebesar 25.2 persen dengan kenaikan pinjaman antar tahun 1985-1989 sebesar 33.5 triliun yen telah menyebabkan pinjaman rumah pada sektor *real estate* juga mengalami kenaikan pada tahun 1989. Selain itu, didukung pemberian investasi sektor *real estate* dan sektor keuangan, terutama saham. Pembangunan di berbagai daerah dan transaksi saham di bursa saham Tokyo atau *Tokyo Stock Exchange* mengalami peningkatan dari 264 milyar yen pada 1985 menjadi 1.308.5 milyar yen pada 1989.⁶⁷

Aliran dana dari bank ke masyarakat sangat meningkat pada level tinggi yaitu sekitar 7.5 persen hingga 11.5 persen antara tahun 1986-1989.⁶⁸ Untuk mendukung peningkatan peredaran uang, setelah penandatanganan *perjanjian Louvre*, pemerintah mengeluarkan dana stimulus sebesar 6 triliun yen pada Mei 1987 kepada beberapa sektor usaha.⁶⁹ Indikator pengeluaran dana dapat diketahui dari deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan dana masyarakat seperti mata uang asing, tabungan yang tersimpan di bank. Indikator tersebut menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan PNB (Produk Nasional

⁶⁷ *Ibid.*, 79.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

Bruto) sekitar 10.8 persen dibandingkan 4.9 persen PNB pada 1987, 10.2 persen dibandingkan 6 persen PNB pada 1988 dan 12 persen dibandingkan 6 persen PNB pada 1989.⁷⁰

Aliran dana yang kedua adalah Program Pinjaman dan investasi fiskal (FILP/*Fiscal Investment and Loan Program/zaito*) dan Paket Stimulasi Fiskal (*Fiskal Stimulus Packages*) yang dikeluarkan oleh pemerintah institusi keuangan. Kedua program ini mempengaruhi perkembangan *bubble economy* secara jangka pendek.

Program pinjaman dan investasi fiskal (*Fiscal investment and Loan Program/FILP*) merupakan anggaran pemerintah yang berasal dari simpanan masyarakat, dana pensiun, dana asuransi. Anggaran tersebut digunakan untuk investasi kepada institusi keuangan pemerintah, perusahaan, dan pemerintah lokal sebagai penggunaan jangka panjang (lima tahun atau lebih). Pada tahun 1985-1989, total pengeluaran pembelanjaan pada FILP adalah 20.49 triliun yen, 21.54 triliun yen, 27.59 triliun yen, 29.52 triliun yen dan 33.01 triliun yen.⁷¹ Kurang cukupnya memenuhi permintaan domestik pada investasi maka pemerintah mengeluarkan penggunaan anggaran tambahan (*Supplemental Budget/hosei yosan*) yang merupakan bagian dari Paket Stimulasi Fiskal (*Fiskal Stimulus Packages*) sebagai cara untuk menyeimbangkan perekonomian dalam negeri dengan ekonomi dunia internasional. Untuk itu, pada tahun 1986 dikeluarkan sejumlah dana sebesar 3 triliun yen dan pada tahun 1987 sejumlah 6 triliun yen.⁷²

Aliran dana berikutnya adalah *tokkin* dan *fantora*. *Tokkin* (*Tokutei kinsen shitaku*) adalah investasi dari bank berupa uang dengan pajak keuntungan bagi investor. Investasi tersebut sebagian besar diberikan untuk perusahaan jasa keuangan, asuransi (perusahaan penerima investasi tersebut disebut *eigyo tokkin*). Pada tahun 1989 dana sebesar 5 triliun yen dikeluarkan untuk investasi dan 2 triliun yen diberikan kepada perusahaan jasa keuangan seperti Nomura, Daiwa, Nikko, dan Yamaichi.⁷³ *Fantora* (*Fund trust*) adalah investasi jangka pendek

⁷⁰ Nakamura, Takafusa. *op.cit.*, hlm 263.

⁷¹ Grimes, Wiliam. *op.cit.*, hlm 89.

⁷² *Ibid.*, 121

⁷³ Hsu, Robert C. *op.cit.*, hlm 449.

dengan keuntungan yang tinggi. Dana ini diberikan untuk mendapatkan insentif dari investor.

3.2 Perubahan Ekonomi pada Masa *Bubble Economy*

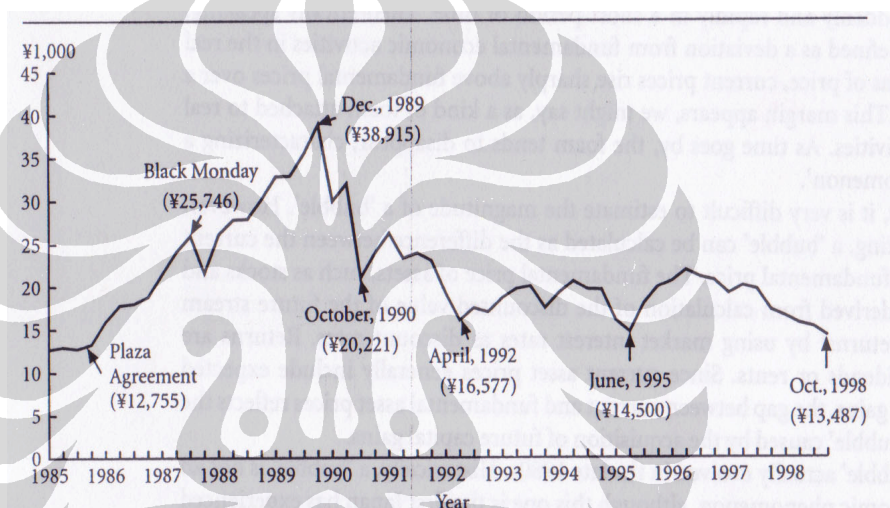
Penerapan kebijakan ekonomi melalui aliran dana yang besar dan nilai Yen yang tetap tinggi mengakibatkan perubahan keadaan ekonomi dalam negeri. Perubahan keadaan ekonomi yang terjadi cukup berbeda dengan keadaan ekonomi paruh pertama tahun 1980-an. Yen yang tinggi telah menjadikan harga produk dalam negeri turun sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan memengaruhi perdagangan Jepang. Untuk mengimbangi keadaan tersebut pemerintah mengeluarkan dana besar-besaran berupa kemudahan pinjaman dan investasi terhadap berbagai sektor. Sektor swasta dan individu memanfaatkan kemudahan pinjaman dan investasi untuk investasi jangka panjang bagi masa depan dan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan aset, seperti saham, dan *real estate*. Sektor industri pun memanfaatkan keadaan tersebut dengan tujuan untuk memajukan perindustrian dan perdagangan Jepang. Pemanfaatan keadaan oleh hampir seluruh sektor ekonomi telah memunculkan Perubahan pada akhir paruh kedua 1980-an yaitu masa *bubble economy*. Ada beberapa hal yang menunjukkan perubahan keadaan ekonomi pada masa *bubble economy* yaitu fluktuasi harga aset, akumulasi aset, tingkat konsumsi, dan perluasan industri.

3.2.1 Fluktuasi Harga Aset

Memasuki akhir tahun 1985 harga aset Jepang mengalami fluktuasi yang cukup drastis. Dipicu oleh dana investasi, tingginya nilai Yen, dan pembukaan produk keuangan yang baru mengakibatkan spekulasi pada kenaikan harga terhadap aset, seperti saham dan *real estate*. Kenaikan harga aset merupakan keuntungan bagi individu dan perusahaan. Keuntungan didapatkan dengan menjual kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau disebut *capital gain*. Selain itu, adanya teori ekspektasi pada harga mengakibatkan kenaikan jumlah pembeli dan harga aset yang menjelaskan bahwa pembeli membeli aset

pada tingkat harga yang tinggi daripada harga sebenarnya kemudian menunggu untuk menjual produk tersebut pada harga yang lebih tinggi lagi.⁷⁴

Salah satu aset yang mengalami kenaikan adalah saham. Pasar saham Tokyo (*Tokyo Exchange Market*) memiliki dua saham besar yaitu saham Nikkei dan saham Topix yang kedudukan dapat disejajarkan dengan saham dunia seperti *Dow Jones* milik Amerika Serikat. Saham Nikkei diperjualbelikan oleh perusahaan, terutama pada industri berat dan beberapa perusahaan kecil. Saham Topix diperjualbelikan oleh perusahaan kecil, dan menengah. Maka, sebagai indikator kenaikan harga aset pada saham diambil sebagai contoh saham Nikkei. Data kenaikan harga index saham Nikkei dapat dilihat pada Grafik 3.1



Grafik 3.1 Pergerakan Harga Saham Nikkei

Sumber : Ishi, Hiromitsu. *Making Fiscal Policy in Japan: Economic Effects and Institutional Settings*. (New York: Oxford university, 2000). hlm 76.

Grafik 3.1 diatas menunjukkan bahwa harga saham Nikkei mengalami kenaikan sejak tahun 1985 saat perjanjian *Plaza* senilai 12.755 yen per lembar surat saham. Harga indeks saham menjadi stabil pada level antara 12.000 yen dan 13.000 yen pada tahun 1986. Tahun berikutnya, harga saham Nikkei terus naik hingga mencapai 25.000 yen dan naik pada level 25.746 yen. Pada tahun yang sama, bersamaan harga saham Nikkei meninggi telah terjadi *black Monday* yang mengakibatkan harga turun pada level 21.710 yen, 29 Oktober 2009.⁷⁵ Meskipun demikian harga saham tidaklah turun terus menerus, tetapi kembali naik pada

⁷⁴ www.economywatch.com/economy-articles/bubbles-economy.html.

⁷⁵ *Black Monday* adalah jatuhnya saham *Dow Jones* di pasar saham wall street, Amerika Serikat terjadi pada 19 Oktober 1987.

tahun 1988 dan 1989. Kenaikan tahun 1988 sebesar 39.9 persen pada level harga 30.000 yen. Pada tahun 1989, nilainya tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 1986, harga saham memuncak pada level 38.915 yen pada Desember 1989. Kenaikan indeks saham Nikkei yang drastis tersebut juga membuktikan bahwa pasar saham Jepang menyumbang lebih dari 42 persen dari semua nilai pasar saham di seluruh dunia dan naik 15 persen dari tahun 1980. Kemajuan pasar saham Jepang ini menghasilkan pendapatan dari rasio harga saham Nikkei pada akhir tahun 1988 sebesar 58.67 persen dan rata-rata diperkirakan hanya menghasilkan 51 persen.

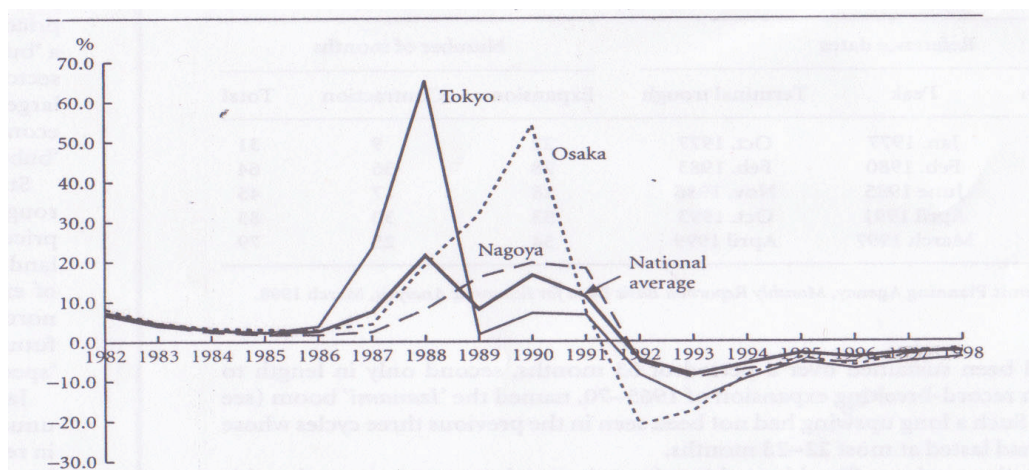
Situasi pasar saham Jepang ini termasuk keadaan abnormal, karena didorong banyak perusahaan dan individu bertransaksi saham maka rata-rata jumlah perdagangan pada tahun 1989 adalah melebihi satu milyar per hari.⁷⁶ Perusahaan melakukan investasi saham dalam pasar saham dikenal dengan *zaitech*.⁷⁷ *Zaitech* memiliki peran penting dalam kenaikan harga saham pada akhir 1980-an. Perusahaan manufaktur seperti *Toyota Motor*, *Nissan Motor*, dan *Matsushita Electric* mendapatkan keuntungan sebelum dipotong pajak dari *zaitech* dari 40 persen hingga 60 persen keuntungan, keuntungan tersebut diluar dari produksi manufaktur.⁷⁸

Kenaikan pada *real estate*, terutama tanah, harganya sama menguatnya dengan harga saham. Kemudahan mendapatkan pinjaman dari bank telah menstimulasi aktifitas ekonomi yang mengarah kepada pinjaman kredit perumahan dan bangunan, maupun pembelian tanah. Namun, tanah lebih banyak digunakan sebagai jaminan dalam peminjaman dana bank yang kemudian memicu spekulasi harga tanah. Kenaikan harga tanah berbeda dari saham karena adanya perbedaan regional, data dapat dilihat pada Grafik 3.2.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Zaitech* atau *zaitekku* (tekku adalah teknologi dan zai adalah aset keuangan) investasi bersama pada dana yang berlebihan dalam saham dan obligasi untuk mencari keuntungan

⁷⁸ Hsu, Robert C.*op.cit.* hlm 90



Grafik 3.2 Pergerakan Harga Tanah

Sumber : Ishi, Hiromitsu. *Making Fiscal Policy in Japan: Economic Effects and Institutional Settings*. (New York: Oxford University, 2000). hlm 77.

Kenaikan harga tanah terus menaik pada tahun 1986 dan 1987, peningkatan pertama pada distrik bisnis kota Tokyo dan kemudian bertahap menyebar ke Nagoya dan Osaka. Harga tanah komersial di Tokyo mulai naik sekitar 12.5 persen pada tahun 1985, 48.2 persen pada tahun 1986 dan 61.1 persen pada tahun 1987. Kenaikan harga tanah ini juga memicu kenaikan perumahan yang mencapai 70 persen pada tahun 1988, bangunan komersial naik sebesar 80 persen. Kenaikan di distrik komersial Tokyo (Chuo, Chiyoda, dan Minato) adalah diatur oleh kenaikan permintaan untuk ruang kantor dikarenakan aktivitas perekonomian Jepang banyak terkonsentrasi di Ibukota.

Selain itu, Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone memulai pembaruan urban (yang disebut *Urban Renaissance*). Pembaruan urban adalah Deregulasi Administrasi Nakasone yaitu pemanfaatan standar tanah dan bangunan, pengurangan tanah milik negara, bertujuan untuk kemajuan pembangunan proyek skala besar di daerah perkotaan, seperti perkantoran, dan apartemen. Mei 1985, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Modal Proyek Reformasi (*The Capital Reform Project*) sebesar 10.6 triliun yen untuk pembangunan dan mengumumkan inflasi permintaan gedung perkantoran di Tokyo.⁷⁹ Pembangunan tersebut merupakan hasil dari konsep pemerintah Jepang untuk menjadikan Tokyo sebagai area metropolitan dalam skala internasional. Ini membawa pada kenaikan harga

⁷⁹ *Ibid.*,174

tanah di distrik bisnis Tokyo. Naiknya harga tanah di daerah komersial, seperti di distrik bisnis menyebar ke daerah pemukiman karena individu yang telah menjual tanah untuk membangun gedung-gedung perkantoran menjadi tidak punya lahan untuk tempat tinggal. Akibatnya, terjadi perpindahan pemukiman ke daerah pinggiran pusat kota dan menempati tanah dan rumah yang belum terkena kenaikan harga. Pada tahun 1989, harga perumahan di Tokyo seperti apartemen meningkat drastis, yaitu untuk luas ruangan 75 meter persegi harga rata-ratanya adalah 54.975.000 yen, harganya 8.62 kali dari rata-rata gaji bulanan karyawan.⁸⁰

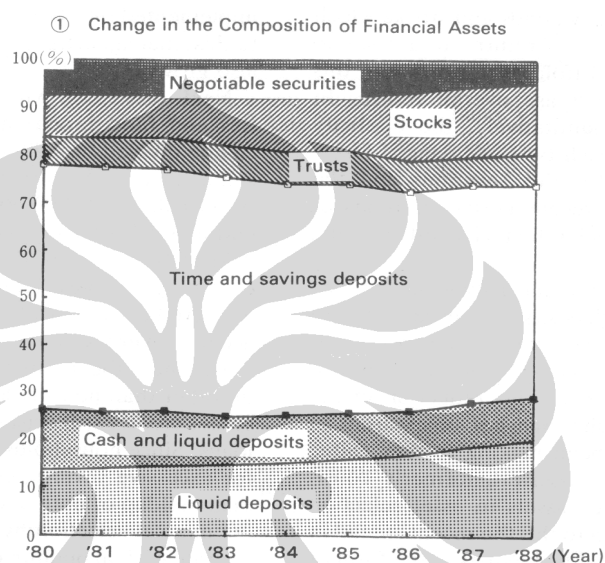
Lalu, spekulasi *real estate* (tanah, bangunan, dan rumah) yang intensif memberikan kontribusi kepada peningkatan lebih lanjut harga tanah. Harga tanah di Jepang cenderung meningkat dengan mudah karena kelimpahan peredaran uang di masyarakat dan adanya sistem pajak tanah yang menghambat pemanfaatan lahan secara efektif. Kenaikan tersebut akhirnya menyebar ke tanah pemukiman di kota, tetapi belum mencapai Osaka atau Nagoya hingga 1988 dan 1989. Tahun 1989, pertumbuhan harga tanah Tokyo telah mulai merambat ke Osaka, dan Nagoya muncul sebagai pengganti. Grafik 3.2 harga tanah di Osaka mengalami kenaikan 3.3 kali lipat pada tahun 1990 dan kemudian Nagoya menjadi area terbesar ketiga yang mengalami kenaikan harga pada tahun 1988 dan 1990.

3.2.2 Akumulasi aset

Fluktuasi harga terhadap aset *real estate* dan saham menunjukkan bahwa permintaan terhadap aset meningkat. Permintaan yang meningkat mengakibatkan banyaknya individu dan perusahaan memiliki aset. Bagi individu maupun perusahaan yang memiliki kesempatan meminjam uang dari bank dapat membeli dan memiliki aset. Aset yang dimiliki sebagian disimpan dalam waktu yang lama, dan menunggu untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena itu terdapat penumpukan atau akumulasi aset dalam perusahaan yang bertujuan sebagai modal pengembangan usaha dan individu sebagai keuntungan pribadi.

⁸⁰ Hsu, Robert C. *op.cit.*, hlm 215.

Sejak tahun 1987 pertumbuhan aset sektor manufaktur dan non-manufaktur sekitar 1.4 kali dan 1.6 kali.⁸¹ Untuk kepemilikan *real estate* pada sektor swasta total nilainya adalah sejumlah 39 triliun yen pada 1985 naik menjadi 81 triliun yen pada Juni 1989.⁸² Kepemilikan saham naik melebihi dari kepemilikan aset pada periode yang sama yaitu dari 20 triliun yen ke 41 triliun yen.⁸³ Selain itu, individu pada sektor rumah tangga juga memiliki kepemilikan aset. Data kepemilikan aset bagi sektor individu dapat dilihat pada grafik 3.3



Grafik 3.3 Komposisi Kepemilikan Aset Individu

Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 216.

Pada tahun 1987 setiap individu memiliki aset sejumlah 51 milyar yen.⁸⁴ Diikuti kepemilikan dana cair (*cash and liquid deposits*) menaik maka saham juga merupakan aset yang cukup banyak dimiliki oleh individu karena kenaikannya diatas 90 persen dari tahun 1986 hingga 1988. Berbagai surat saham baru yang dikeluarkan pada awal paruh kedua 1980-an dan suku bunga pinjaman yang rendah dari bank telah memicu minat individu untuk membeli dan memiliki berbagai surat saham tersebut. Selain keuntungan, juga dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Sedangkan pada kepemilikan aset *real estate* untuk perumahan, individu tidak banyak memiliki aset tersebut karena harga perumahan yang mahal

⁸¹ *Economic Survey of Japan 1988-1989*. *Op.Cit.*, hlm.

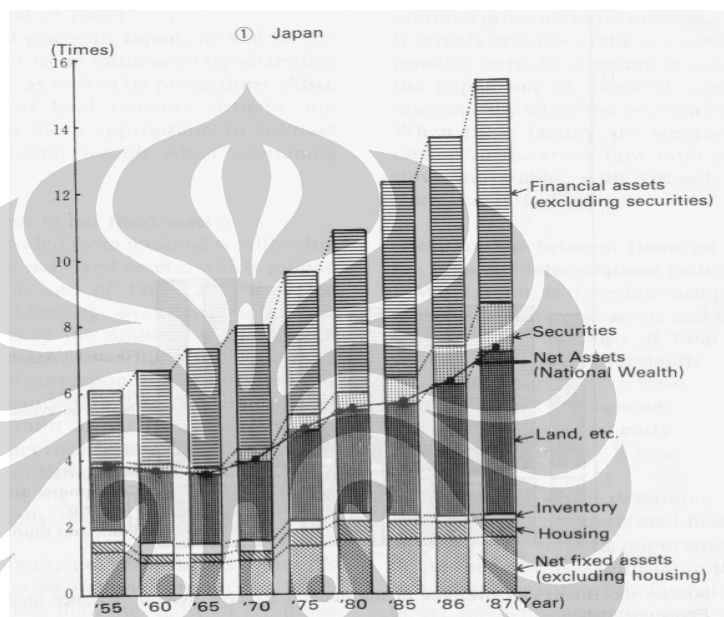
⁸² *Ibid.*, 214

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*, 215

membuatnya harus meminjam dana melalui *jusen*.⁸⁵ Saat itu, pinjaman yang diberikan sejumlah 81 triliun yen.⁸⁶ Perumahan yang mahal mengakibatkan tanah hanya digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada bank dengan bunga rendah.

Kenaikan aset tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah aset secara nasional di Jepang meningkat. Data aset nasional Jepang terdapat pada Grafik 3.4



Grafik 3.4 Aset Nasional Sebagai Rasio pada PNB (Produk Nasional Bruto)

Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 189

Nilai total aset nasional pada akhir 1987 adalah 15.5 kali dari PNB. Komposisi aset tersebut adalah aset keuangan karena sejak dikeluarkannya surat saham baru dari tahun 1980 hingga 1985 hasilnya meningkat terus dari tahun tahun 1980 hingga 1987. Aset keuangan mengalami kenaikan sebesar 50 persen pada akhir 1970-an dan naik terus sebesar 53 persen pada akhir tahun 1987. Didukung dengan akumulasi aset, pada *real estate* dan saham sejak fluktuasi harga pada tahun 1985 maka tanah dan saham menunjukkan kenaikan aset Jepang.

⁸⁵ *Jusen* (*Jutaku kinyu senmon gaisha*) adalah perusahaan bank komersil yang meminjam dana pemerintah (*FILP*) untuk memberikan pinjaman khusus perumahan.

⁸⁶ *Ibid.*,

3.2.3 Tingkat Konsumsi

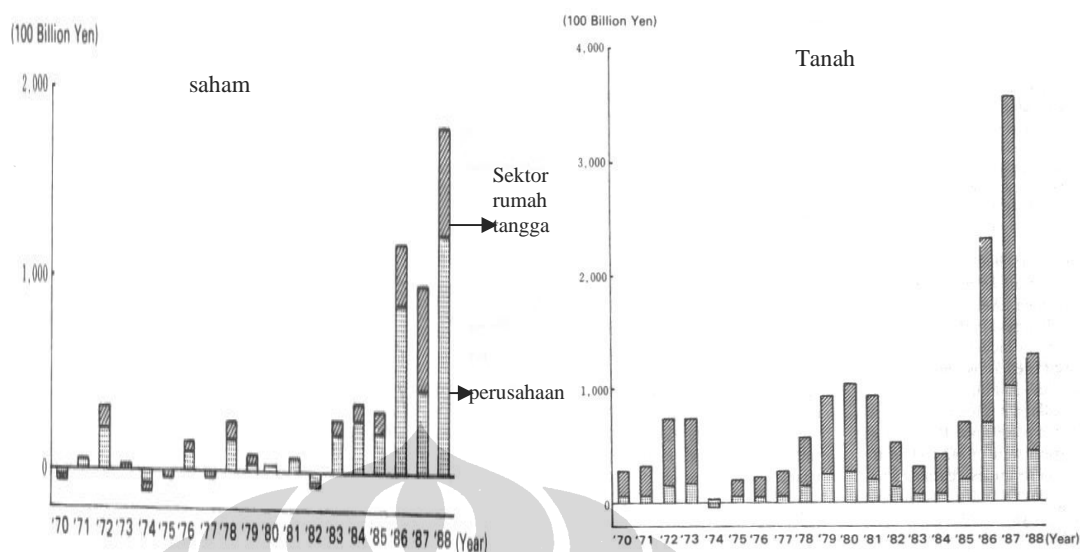
Harga dan akumulasi aset tergantung pada beredarnya uang dan harapan untuk keuntungan pada saat itu. Peredaran uang memicu peningkatan pendapatan untuk membeli aset sehingga individu dan perusahaan mampu membelinya. Dengan kata lain, fluktuasi harga aset tergantung dari pendapatan, pinjaman dengan suku bunga rendah, keuntungan saham (sewa atau penerimaan lainnya). Maka, aliran pendapatan sangat diharapkan oleh pemilik aset untuk dapat melakukan perputaran dana yang dimilikinya.

Pendapatan mengalami kenaikan yang drastis selama masa *bubble economy*. Pertumbuhan pendapatan karyawan pada tahun 1987 sejumlah 4.3 persen naik menjadi 6.4 persen.⁸⁷ Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan gaji pada musim panas dan bonus akhir tahun yang berlebihan setiap tahunnya. Saat gaji pokok naik sekitar 2 persen pada 1987 menjadi 3.2 persen pada tahun 1988 maka uang lembur pun mengalami kenaikan yang sama dari 2.5 persen menjadi 3.7 persen.⁸⁸ Industri yang memberikan kenaikan pendapatan tersebut adalah sebagian besar industri transportasi dan komunikasi dan manufaktur maupun konstruksi. Bagi individu pada sektor rumah tangga pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 3.7 persen pada tahun 1988 yang rata-rata pendapatan per bulan sekitar 347.695 yen. Kenaikan pendapatan ini berasal dari bonus, pendapatan istri dari bekerja *part-time* (naik sebesar 12.2 persen dari 1987 hingga 1989),⁸⁹ dan pendapatan sementara. Selain itu, pendapatan sektor rumah tangga dan sektor swasta juga didapatkan dari transaksi tanah dan saham dalam bentuk *capital gain*. Data dapat dilihat pada Grafik 3.5.

⁸⁷ *Ibid.*, 6

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*, 56



Grafik 3.5 Pergerakan *Capital Gain* pada Tanah dan Saham

Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 198

Capital gain merupakan pendapatan dari transaksi di pasar saham dan tanah. Tahun 1986 rata-rata *capital gain* tanah dan saham di sektor rumah tangga sebesar 236 triliun yen dan 121 triliun yen. Tahun 1987 rata-ratanya menjadi bertambah pada tanah dan menurun pada saham yaitu 359 triliun yen dan 99 triliun yen. Meskipun *capital gain* saham sempat menurun pada tahun 1987 karena terjadinya *Black Monday* tetapi tanah tetap naik. Kenaikan tanah karena di daerah Tokyo harga tanah melonjak tinggi dari tahun sebelumnya. Dan pendapatan dari *capital gain* melebihi PDB, dimana rasio *capital gain* tanah dan saham terhadap PDB meningkat pada tahun 1988-1989. Tahun 1987 tanah dan saham sebesar 21.8 persen dan 119.3 persen, meningkat menjadi 47.8 persen dan 44.9 persen kemudian tahun berikutnya adalah 48.9 persen dan 79.2 persen.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari *capital gain* bagi individu dan sektor swasta meningkat melebihi PDB Jepang, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi Jepang.

Pendapatan menghasilkan biaya pengeluaran untuk konsumsi. Penggunaan konsumsi sangat bervariasi. Dari perjalanan keluar negeri, konsumsi produk lokal, hingga kebutuhan waktu senggang. Biaya pengeluaran untuk pergi ke luar negeri

⁹⁰ Ishi, Hiromitsu. *op.cit.*, hlm 78.

mengalami kenaikan dari tahun 1980 sebesar 220.000 yen hingga 1988 sebesar 250.000.⁹¹ Ini menunjukkan bahwa Jepang mengalami perubahan gaya hidup. Barang yang dikonsumsi pun semakin beraneka ragam. Produk televisi berwarna tipe 15 inch dari 32.4 persen pada tahun 1986 menjadi 36 persen pada tahun 1988, dan pembelian mobil meningkat pada tahun yang sama dari 12 persen hingga 16.7 persen, dan alat perekam (VTR/*Video Tape Records*) meningkat sebesar 13.9 persen menjadi 26.5 persen.⁹² Konsumsi untuk kebutuhan olahraga, keanggotaan club golf, dan pusat kebudayaan menjadi meningkat mencapai 4.9 persen. Jadi, tingkat konsumsi dalam negeri Jepang mengalami peningkatan, baik dalam produk maupun kebutuhan tersier seperti hiburan dan perjalanan ke luar negeri.

3.2.1 Perluasan Industri

Saat terjadinya *bubble economy* industri Jepang mengalami perkembangan yang cukup berarti. Diawali dengan yen yang tinggi, investasi dan kenaikan harga aset dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap keadaan perekonomian dalam negeri. Hal positifnya yaitu mendorong peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk yang tidak diekspor melalui peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi, penguatan penjualan produk di dalam negeri sehingga meningkatkan pendapatan, dan pergeseran modal dan tenaga kerja dengan pembukaan area manufaktur baru berdasarkan daya saing. Sedangkan hal negatifnya, yaitu beberapa produk ekspor kehilangan daya saing karena investasi asing langsung terhadap Jepang meningkat sehingga menurunkan jumlah ekspor dan meningkatkan impor dari asing, dan impor produk setengah jadi menggantikan produk lokal sehingga meningkatkan jumlah produk impor. Kedua pengaruh tersebut terjadi dalam sektor industri Jepang dan memengaruhi perdagangan Jepang.

Tabel 3.2 menunjukkan pinjaman dana pada sektor manufaktur besar, hal ini memberikan sisi positif pada peningkatan permintaan dalam negeri melalui investasi teknologi dan penggunaan produk dalam negeri. Investasi difokuskan pada pengembangan teknologi bertujuan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang menuntut adanya nilai tambah teknologi produk Jepang. Investasi

⁹¹ *Economic Survey of Japan 1988-1989. op.cit.*, hlm 49.

⁹² *Ibid.*,

yang diberikan pada awal paruh pertama mendorong pengembangan teknologi tersebut. Data investasi pada beberapa sektor industri manufaktur awal paruh kedua tahun 1980-an dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Pergerakan Investasi Penelitian dan Pengembangan Teknologi

	FY 1983 (A)	FY 1986 (B)	(B)-(A)
Food Industry	59.0	57.7	△ 1.3
Textile Industry	30.5	29.1	△ 1.4
Pulp, Paper Industry	73.4	77.6	4.2
Publishing, Printing Industry	76.4	56.4	△ 20.0
Chemical Industry	92.1	91.3	△ 0.8
Petroleum Products, Coal Products Industry	56.8	51.0	△ 5.8
Rubber Products Industry	84.6	86.5	1.9
Ceramics Industry	55.5	53.4	△ 2.1
Steel Industry	73.4	50.9	△ 22.5
Non-ferrous Metals Industry	47.2	43.2	△ 4.0
Metal Products Industry	37.5	45.2	7.7
Machinery Industry	71.1	65.2	△ 5.9
Electrical Machinery Industry	89.7	91.1	1.4
Transportation Machinery Industry	87.9	85.9	△ 2.0
Precision Machinery Industry	56.9	54.9	△ 2.0

Source: Taken from the "Survey Report on Research and Development Activities", prepared by the Management and Coordination Agency.

Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 95

Pemerintah menurunkan pemberian investasi pengembangan dan penelitian teknologi pada industri baja, dari 73.4 persen menurun menjadi 50.9 persen. Penyaluran invesatsi yang besar pada industri mesin elektrik, mesin transportasi, industri kimia, dan industri karet. Industri tersebut melakukan pengembangan teknologi untuk pasar dalam negeri dan luar negeri. Permintaan dalam negeri lebih diutamakan sehingga meningkat dari tahun 1986 hingga 1989 sebesar, 3.9 persen, 5.2 persen, 7.2 persen, dan 5.9 persen.⁹³ Investasi ini meningkat produktivitas dan menghasilkan sejumlah produk untuk diekspor.

Namun, nilai Yen memengaruhi jumlah ekspor dan impor Jepang. Yen yang tinggi mengakibatkan perubahan harga ekspor dan impor yang dapat mengurangi jumlah ekspor. Harga indeks input bahan baku (dalam dolar) menurun untuk sektor manufaktur dan harga ekspor meningkat (*output*). Menurut laporan *Bank of Japan*, bahwa harga indeks input pada sektor *automobile* menurun dari tahun 1985-1988 sebesar 100 ke 92 dan mesin elektrik sebesar 92 ke 83. Sedangkan harga ekspor juga menurun tetapi lebih besar daripada input dari tahun 1985-1988 sebesar 103 ke 93 dan 93 ke 83.⁹⁴ Harga tersebut memengaruhi

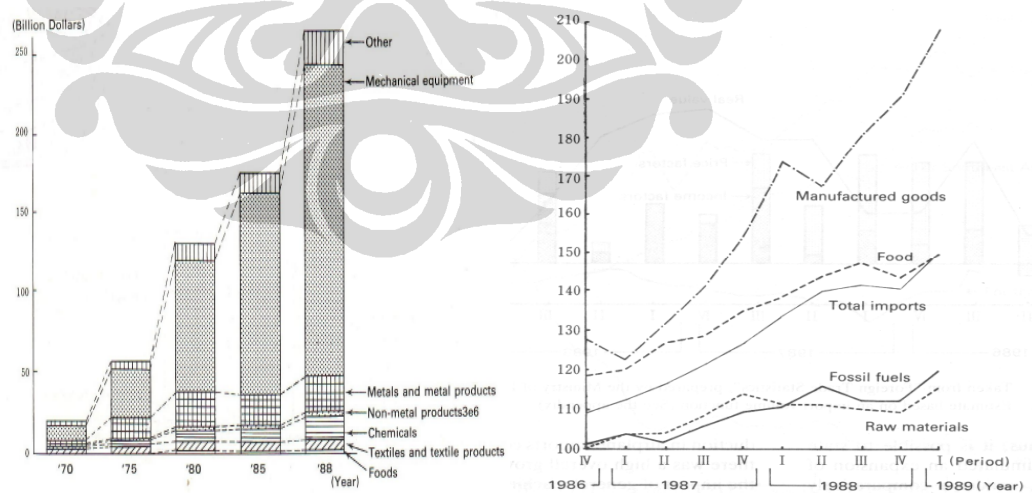
⁹³ *Ibid.*, 4.

⁹⁴ *Ibid.*,

jumlah perdagangan Jepang sehingga pasar Jepang dapat dimasuki oleh produk asing.

Awalnya nilai ekspor Jepang (dalam Yen) menurun dari paruh pertama 1980-an diatas 40 triliun yen menjadi dibawah 35 triliun yen pada tahun 1986-1987.⁹⁵ Keadaan ini terjadi pada sektor industri yang melakukan ekspor yaitu harga grosir pada barang industri mengalami penurunan sekitar 10 persen, keuntungan bisnis dalam penjualan mengalami penurunan dari 5 persen ke 2.5 persen dalam kurun waktu satu tahun pada 1986.⁹⁶ Kondisi ini memengaruhi jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang baru saja mengalami kestabilan, tetapi harus terjadi stagnasi kembali pada saat nilai Yen meninggi terhadap dolar. Untuk mengimbangi akibat meningginya nilai Yen terhadap dolar, pemerintah mengalirkan dana kepada sektor industri sehingga keadaan ekonomi dapat berkembang.

Kenaikan harga ekspor dan penurunan harga impor tidak membuat Jepang menurunkan jumlah ekspornya terutama pada beberapa produk andalannya, seperti mobil, televisi, alat elektrik, dan mesin transportasi. Aliran dana untuk investasi telah membuat Jepang bertahan dalam ekspornya tetapi pada impor terjadi pergeseran produk. Data pergerakan impor dan ekspor produk Jepang dapat diketahui pada Grafik 3.6 di bawah ini.



Grafik 3.6 Pergerakan Jumlah Ekspor dan Rasio Impor

Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*, (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 30

⁹⁵ Nakamura, Takafusa. *op.cit.*, hlm 255.

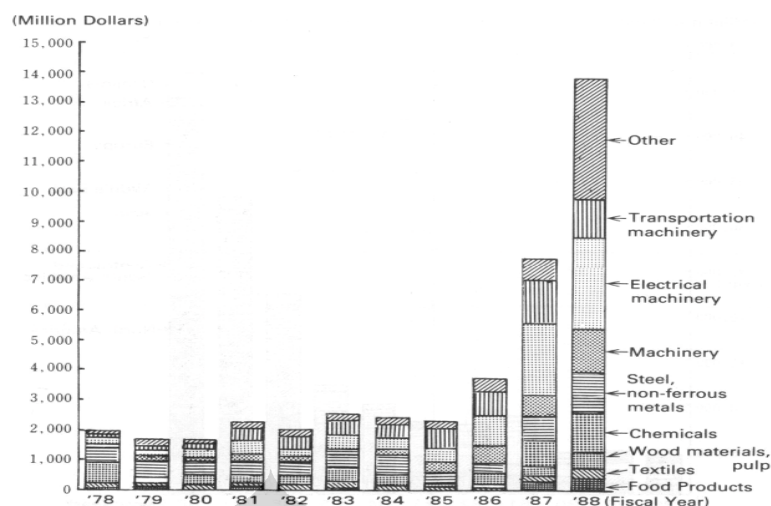
⁹⁶ *Ibid.*,

Meskipun harga ekspor meningkat ekspor Jepang tetap meningkat pada produk andalannya yaitu peralatan mesin (mesin, mesin elektrik, dan *automobile*) pada tahun 1988. Karena peningkatan investasi pada sektor manufaktur maka ekspor pada produk tersebut meningkat. Pada tahun 1989 ekspor peralatan mesin tetap meningkat sebesar 74.7 persen. Negara tujuan ekspor pada tahun 1989 adalah 33.9 persen Amerika, 26.7 persen Asia Tenggara, dan 20.5 persen Eropa Barat.⁹⁷ Perubahan indeks harga memberi pengaruh terhadap jumlah impor produk ke Jepang dimana antara tahun 1987-1988 total impor meningkat drastis. Penyeimbangan pada pengembangan nilai tambah teknologi dalam negeri telah menghasilkan impor produk manufaktur (peralatan dan mesin, produk kimia, tekstil, dan metal) dari negara lain yang pergerakannya diatas minyak mentah dan produk bahan baku. Negara impor Jepang tahun 1989 sebagian besar Amerika sebesar 22.9 persen yang naik dari tahun 1980 sebesar 17.4 persen, Asia Tenggara sebesar 25.1 persen, dan Eropa Barat sebesar 16.5 persen.⁹⁸ Jumlah ekspor Jepang terus meningkat dan impor terus bertambah. Ini adalah hasil dari pembukaan pasar dalam negeri Jepang terhadap produk negara Eropa dan Amerika.

Sejak dibukanya impor Jepang bagi produk negara lain dan ditetapkannya nilai yen tahun 1985 maupun aliran dana bagi berbagai sektor di Jepang, Jepang meningkatkan perluasan industri dengan peningkatan investasi asing langsung (Penanaman Modal Asing) terhadap perusahaan Jepang di Eropa, Asia dan Amerika Utara. Perusahaan Jepang yang ada di ketiga negara tersebut investasinya meningkat pada lingkup tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Investasi asing langsung Jepang tidak perlu menerima impor bahan mentah seperti minyak mentah terlalu banyak karena kondisi alam masing-masing negara mencukupkan kebutuhan terhadap produksi industri sehingga pergerakan impor bahan mentah tidak mengalami peningkatan. Investasi asing langsung diberikan pada beberapa sektor industri manufaktur, data ini dapat dilihat pada Grafik 3.7.

⁹⁷ Nakao, Shigeo. *op.cit.*, hlm 12.

⁹⁸ *Ibid.*,



Grafik 3.7 Investasi Asing Langsung Pada Industri Manufaktur

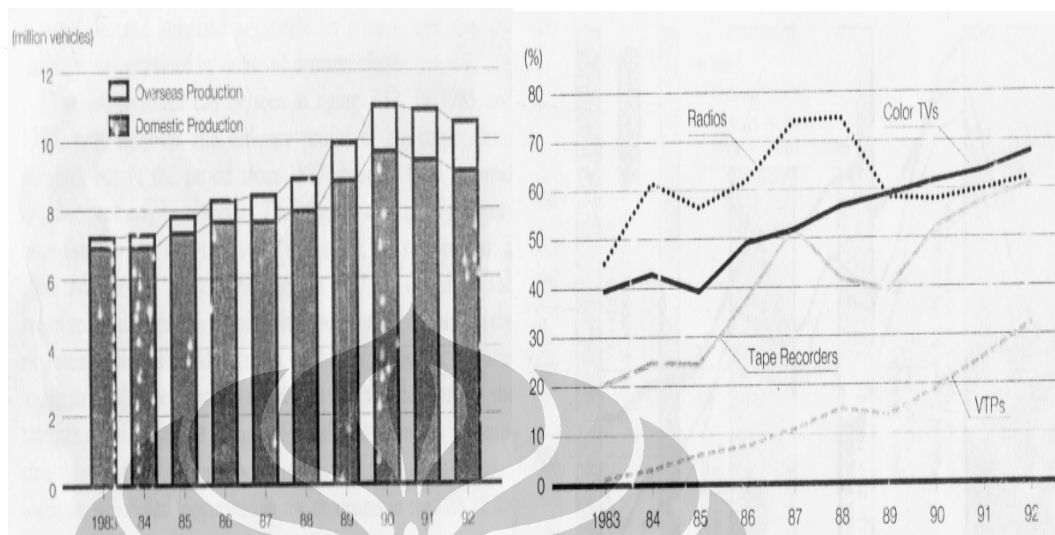
Sumber : *Economic Survey of Japan 1988-1989*. (Tokyo : Economic Planning Agency). hlm 152

Investasi Asing langsung yang sempat mengalami penurunan antara tahun 1983 hingga 1985 dikarenakan friksi perdagangan dengan negara lain. Sejak yen meninggi pada tahun 1986 investasi asing langsung kembali meningkat hingga 1988. Investasi antara tahun 1986-1990 terkonsentrasi pada sektor manufaktur, yaitu senilai 57.213 milyar dolar, sektor keuangan dan asuransi senilai 54.459 milyar dolar, dan sektor *real estate* senilai 29.981 milyar dolar. Peningkatan investasi industri manufaktur, terutama industri transportasi, mesin elektrik, mesin transportasi. Pada tahun 1988 investasi kepada negara Eropa pada industri mesin transportasi diberikan dengan jumlah nominal sekitar 162 milyar yen, industri mesin elektrik sekitar 144 milyar yen.⁹⁹ Hampir sebagian besar produk elektronik dan transportasi dibuat di negara lain seperti radio, televisi berwarna, dan mobil

Investasi asing langsung terjadi karena menguatnya nilai Yen sehingga menjatuhkan sektor industri ekspor. Maka, perusahaan melakukan pemulihan dengan mengurangi biaya produksi dengan cara membuka area manufaktur di negara lain. Cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan Jepang dengan perusahaan lain. Perusahaan Jepang mulai memproduksi di negara lain sebagai alternatif dari mengekspor. Oleh karena itu, pada tahun 1980-an banyak produk elektronik dan transportasi diproduksi di negara lain. Pergerakan

⁹⁹ *Economic Survey of Japan 1988-1989. op.cit.*, hlm 152

produksi kendaraan dan alat elektronik di negara lain digambarkan pada Grafik 3.8.



Grafik 3.8 Perbandingan Produksi Kendaraan Dalam Negeri dan Luar negeri Dan Produksi Alat elektronik Di Luar Negeri

Sumber: Nakamura, Takafusa. *Lecture on Modern Japanese Economic History, 1926-1994*. (Tokyo : University of Tokyo Press, 1995). hlm 255.

Setelah tahun 1985, produksi kendaraan Jepang di luar negeri mengalami peningkatan cukup baik bahkan lebih tinggi daripada jumlah produksi dalam negeri. Selain itu, pada radio, televisi berwarna, alat perekam, dan konsumsi elektronik lainnya juga menunjukkan peningkatan produksi yang mencapai diatas 50 persen dan pada tahun tertentu mencapai 60 hingga 70 persen.

Pembukaan impor dan peningkatan investasi langsung di negara lain telah memengaruhi neraca pembayaran Jepang dan keseimbangan perdagangan (dalam dolar) yang tetap surplus tetapi menurun dari tahun 1988 hingga tahun 1990. Data dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Neraca Pembayaran Jepang (dalam milyar dolar)

Item Year	Neraca Berjalan	Neraca perdagangan	Ekspor	Impor
1970	1,970	3,963	18,969	15,006
1974	-4,693	1,436	54,480	53,044
1978	16,534	24,596	95,634	71,038
1980	-10,746	2,125	126,736	124,611
1982	6,850	18,079	137,663	119,584
1984	35,003	44,257	168,290	124,033
1985	49,169	55,986	174,015	118,029
1986	85,845	92,827	205,591	112,764
1987	87,015	96,386	224,605	128,219
1988	79,631	95,012	259,765	164,753
1989	57,157	76,917	269,570	192,653
1990	35,761	63,528	280,374	216,846

Sumber : Nakao, Shigeo. *The Political Economy of Japan Money*.
(Tokyo : University of Tokyo Press, 1995).hlm 10.

Jadi, nilai yen yang menguat mengakibatkan meningkatnya produksi dan investasi industri Jepang di luar negeri daripada di dalam negeri. Jepang lebih memilih mengembangkan industri di luar negaranya untuk mengatasi masalah pemangkasan biaya produksi pada industri ekspor, penurunan biaya bahan baku, dan penyesuaian harga dalam negeri. Keadaan ini terus terjadi hingga paruh kedua 1980-an, bersamaan ketika Jepang mengembangkan permintaan dalam negerinya melalui investasi industri pada produk yang tidak diekspor. Permintaan dalam negeri pun mengalami kenaikan dengan kenaikan impor sebagai peningkatan kebutuhan masyarakat Jepang. Ini lah yang menjadikan Jepang pada akhir tahun 1980-an sebagai negara industri maju.

Perluasan industri dan peningkatan keadaan ekonomi dalam negeri pada paruh kedua 1980-an menghasilkan Jepang sebagai negara dengan pendapatan per kapita terbesar ketiga pada tahun 1989 yaitu 24.463 dolar.¹⁰⁰ Selain itu, Jepang juga mulai dikenal sebagai negara pemberi pinjaman, terutama kepada negara berkembang. Menurut Anggaran Keuangan Jepang tahun fiskal 1989, menyatakan bahwa Jepang menebar dana bantuan sebesar 11 milyar dolar setara dengan 1.518 triliun yen ke berbagai negara dan cadangan devisanya mencapai 98 milyar dolar setara dengan 1.352 triliun yen.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ishi, Hiromitsu.*op.cit.*, hlm 70

¹⁰¹ www.majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1989/04/01/LN/mbm.19890401.LN20525.id.html.

3.3 Keadaan Akhir *Bubble Economy* Jepang

Kemudahan mendapatkan dana pinjaman pada paruh kedua 1980-an menjadi banyak digunakan oleh masyarakat. Tetapi keadaan tersebut mulai berakhir karena pada akhir tahun 1989, Bank Jepang mulai mengadopsi kebijakan pengetatan uang (*tight money policy*), sebagaimana dipicu oleh kritik sosial pada meningkatnya harga saham dan tanah. Terutama, disebabkan oleh protes masyarakat terhadap kenaikan tanah yang menghancurkan keinginan individu untuk membeli tanah dan membangun rumahnya sendiri. Selain itu, adanya skandal penyimpangan dalam pendistribusian dana pada birokrasi institusi keuangan dan politisi pemerintahan yang bertugas mengatur distribusi tersebut.

Gubernur Bank Jepang, Sumita, pada tahun 1989 menetapkan penggunaan kebijakan pengetatan uang bertujuan untuk mengurangi resiko inflasi harga barang dan pertumbuhan aliran dana yang semakin besar. Bank Sentral Jepang memutuskan untuk menaikkan suku bunga pinjaman (tingkat diskonto) pertama kali dari 2.5 persen menjadi 3.25 persen pada Mei 1989, kemudian pada Oktober 1989 kembali dinaikkan menjadi 3.75 persen.¹⁰²

Pada akhir tahun 1989 Jabatan Gubernur Bank Sentral Jepang, Sumita Satoshi, berakhir dan digantikan oleh deputinya yaitu Mieno Yasushi.¹⁰³ Kebijakan Mieno yang pertama kali tidaklah berjalan baik karena adanya perdebatan dengan Menteri keuangan, Hashimoto Ryutaro.¹⁰⁴ Perdebatan yang terjadi adalah karena pada saat itu Menteri Keuangan memiliki hak prerogatif untuk menunda perubahan suku bunga yang ditentukan Bank Sentral Jepang. Tetapi, keadaan harga barang di pasar dalam negeri yang semakin naik telah memaksa Bank Sentral Jepang untuk menetapkan suku bunga selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Desember 1989 suku bunga dinaikkan menjadi 4.25 persen.¹⁰⁵

Dibawah kebijakan Mieno suku bunga pinjaman dinaikkan dua kali yaitu pada 20 Maret menjadi 5.25 persen dan 30 Agustus menjadi 6 persen. Hasilnya harga saham dan tanah jatuh pada tahun 1990. Dari Grafik 3.2 dan 3.1 menunjukkan sejak kebijakan pengetatan uang pada tahun 1989-1990 dikeluarkan

¹⁰² Grimes, William. *op.cit.*, hlm 142.

¹⁰³ Gubernur Bank Sentral Jepang periode 1989-1994

¹⁰⁴ Menteri Keuangan Jepang periode 1989-1993

¹⁰⁵ *Ibid.*,

maka harga aset tersebut mulai turun yaitu saham Nikkei menurun sebesar 57 persen dari 38,915 Yen pada 1989 menjadi 16,572 Yen pada 1992. Akibatnya, sejumlah sektor industri mengalami kerugian terutama bank, dan sektor swasta yang melakukan transaksi dalam industri jasa keuangan.

Selain itu, dikenakan regulasi peminjaman yang berhubungan dengan transaksi *real estate*. Reformasi pajak tanah diberlakukan untuk pembebanan pajak ke kepemilikan tanah dan *capital gain* atas penjualan tanah. Tanah yang baru dibeli harus dimiliki dengan pajaknya, bernama nilai tanah pajak. Hal ini, secara langsung mengendalikan harga transaksi tanah.

Harga tanah juga menurun karena sedikitnya pembeli dalam beberapa sektor *real estate* sehingga beberapa perusahaan sektor *real estate* merugi. Akibatnya, sejumlah pinjaman untuk sektor *real estate* tidak dapat dijadikan uang untuk diberikan kepada peminjam. Institusi peminjaman untuk *real estate* telah mengalami kerugian yang serius karena terjadinya penurunan nilai jaminan yaitu penurunan harga tanah. Hal ini membuat sejumlah bank dan institusi keuangan mengalami kebangkrutan karena peminjam atau individu tidak dapat membayar atau mengembalikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Keadaan ini memukul sektor swasta sekaligus individu. Kedua belah pihak mengalami kerugian. Perusahaan tidak dapat mengaji karyawan karena penjualan dan keuntungan menurun pada seluruh industri pada tahun 1990 yaitu dari 16 persen menjadi 2.5 persen dan 8.9 persen menjadi 3.0 sehingga harus merumahkan sejumlah karyawan pada saat itu.¹⁰⁶ Bagi individu karena tidak dapat membayar pinjaman maka seluruh harta benda pun disita oleh pihak institusi keuangan. Keadaan ini merupakan masa akhir dari peningkatan ekonomi paruh kedua tahun 1980-an yaitu masa *bubble economy*.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

BAB 4

KESIMPULAN

Pemulihan ekonomi yang dialami Jepang setelah masa *endaka* dan krisis minyak pada akhir tahun 1970-an mengakibatkan ekonomi Jepang tumbuh dengan baik pada paruh pertama 1980-an. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sektor industri telah memberikan kemajuan karena nilai yen yang rendah telah mendorong investasi pada perusahaan dan secara tidak langsung simpanan pada institusi keuangan meningkat. Produktivitas sektor industri pun meningkat dengan memperluas ekspor Jepang kepada sejumlah negara maju seperti Amerika, dan Eropa. Akibatnya, jumlah ekspor lebih besar daripada impor sehingga mengakibatkan surplus perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik menurut Jepang ternyata tidaklah baik menurut negara lain. Karena Jepang memperluas produknya ke mancanegara maka pasar produk negara Barat, Amerika dan Eropa tidak dapat bersaing dengan pasar yang telah dikuasai oleh produk Jepang. Dan negara tersebut mengalami defisit perdagangan. Keadaan tersebut menjadi masalah ekonomi internasional sehingga menimbulkan friksi perdagangan Jepang dengan negara-negara Barat. Negara barat ingin agar produknya dapat masuk Jepang dan menguasai pasar Jepang.

Keadaan ekonomi pada paruh pertama 1980-an, telah membawa Jepang kepada masa *bubble economy* yang terjadi pada paruh kedua 1980-an. Jepang harus mengakhiri keadaan pada paruh pertama 1980-an dengan menyelesaikan friksi perdagangan secara internasional. Peran Jepang dalam dunia internasional membuat Jepang harus mematuhi regulasi yang telah disepakati melalui perjanjian *Plaza Accord*, *Miyazawa-Baker*, dan *Plaza Louvre*. Ketiga perjanjian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan permintaan domestik Jepang melalui internasionalisasi Yen dengan apresiasi nilai mata uang Yen, dan menstimulus berbagai sektor dengan mengurangi tingkat pinjaman.

Pengaruh regulasi internasional menghasilkan kebijakan Jepang yang mengarah kepada pengaturan struktur ekonomi dengan penyesuaian keadaan ekonomi internasional. Pemerintah Jepang menerima pengaruh barat dalam

mengatasi permasalahan perdagangan internasional. Melalui hasil laporan *Maekawa*, pemerintah Jepang melaksanakan berbagai kebijakan yang mengarah kepada peningkatan permintaan dalam negeri dengan tujuan menstabilkan friksi perdagangan Jepang dengan Eropa, dan Amerika. Regulasi yang diterapkan memengaruhi perilaku ekonomi institusi yang mengarah kepada pemanfaatan dana investasi yang diberikan oleh pemerintah, maupun penerapan deregulasi pada pembukaan pasar jasa keuangan baru yang diterapkan untuk menerapkan internasionalisasi ekonomi Jepang.

Pengaruh faktor eksternal dan internal pada akhir paruh pertama 1980-an terhadap perekonomian Jepang telah memicu kemunculan fase *bubble economy* yang terjadi pada paruh kedua 1980-an. Faktor tersebut juga memberikan perubahan pada perekonomian Jepang, baik skala internasional maupun dalam negeri. Perubahan yang terjadi menggambarkan keadaan ekonomi Jepang pada masa *bubble economy*. Perubahan ekonomi pada masa *bubble economy* terjadi karena adanya keadaan yang mendukung, yaitu nilai Yen yang selalu tinggi, aliran dana dari pemerintah dan bank secara besar-besaran.

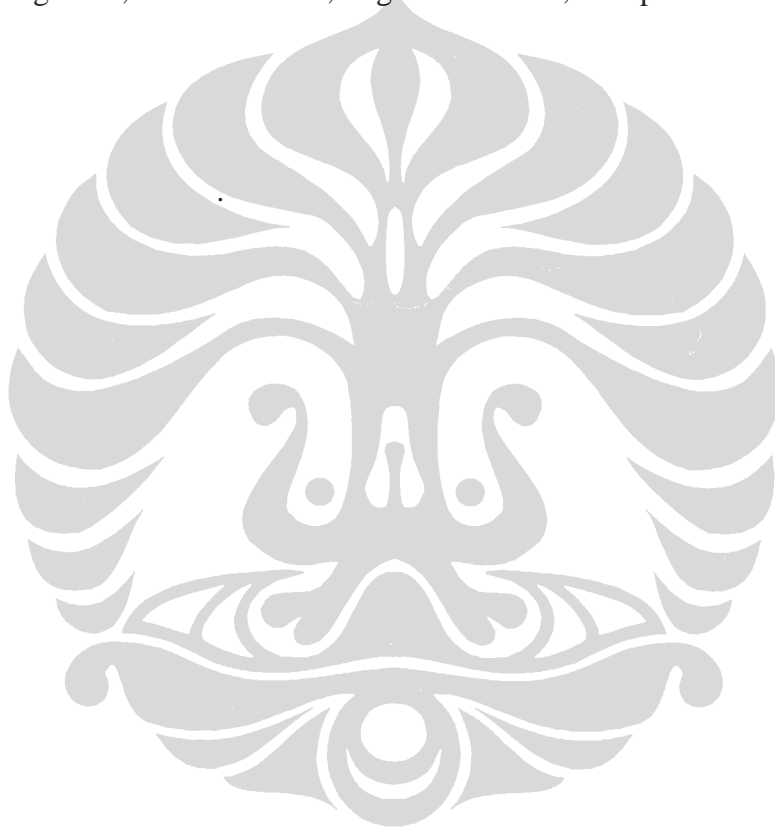
Perubahan yang terjadi pada masa *bubble economy* merupakan akibat dari keadaan ekonomi sebelumnya. Perubahan ekonomi Jepang terjadi secara bertahap dari tahun 1985, penandatanganan Plaza Accord, hingga tahun 1989 selama meningkatnya nilai Yen dan aliran dana terjadi, yaitu fluktuasi harga aset, akumulasi aset, tingkat konsumsi, dan perluasan industri. Perubahan terjadi terutama pada sektor industri manufaktur, sektor jasa keuangan, dan *real estate* yang mengalami peningkatan permintaan dalam negeri. Perubahan tersebut membawa kemakmuran bagi Jepang dibanding dekade sebelumnya, terutama ekonomi dalam negerinya.

Keadaan *bubble economy* berakhir pada tahun 1989 melalui ditetapkannya kebijakan pengetatan uang. Kebijakan tersebut mengakibatkan berakhirnya *bubble economy* Jepang yang telah memberikan kemakmuran bagi berbagai sektor di Jepang.

Analisa dari pembahasan yang didapatkan adalah : Spekulasi tidak selamanya menjadi alasan terjadinya *bubble economy*, kebijakan ekonomi domestik dan pengaruh dunia Internasional juga merupakan faktor pemicu

terjadinya *bubble economy*. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam memberikan kemudahan kredit bagi para perusahaan, menurunkan suku bunga, meningkatkan pengeluaran pemerintah. Ditetapkannya kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh pengaruh dunia internasional, terutama Amerika Serikat yang mendesak Jepang untuk mengatasi perdagangan surplus dengan perjanjian *Plaza Accord*.

Analisa tersebut menunjukkan bahwa perubahan ekonomi yang terjadi selama *bubble economy* disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Perubahan mengarah kepada kemakmuran ekonomi dalam negeri Jepang yaitu fluktuasi harga aset, akumulasi aset, tingkat konsumsi, dan perluasan industri.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : Pradya Paramita, 1991.
- Economic Survey of Japan 1988-1989*. Tokyo : Economic Planning Agency, 1989.
- Konya, Fumiko. "The Rise and Fall of the Bubble Economy." *The Structure of the Japanese Economy*. Ed. Mitsuaki Okabe. London: Macmillan Press, 1996.
- Grimes, William. *Unmaking the Japanese Miracle : Macroeconomic 1985 – 2000*. US: Cornell University Press, 2001.
- Hsu, Robert C. *The MIT Encyclopedia of Japanese Economy*. London: The MIT Cambridge Press, 1999.
- Hideo, Satake. *Nihon Keizai e no Apurochi*. Tokyo: Minerva, 1992.
- Hook, Gleen D and Hasegawa Harukiyo. *The Political Economy of Japanese Globalization*. London: Routledge, 2001.
- Ishi, Hiromitsu. *Making Fiscal Policy in Japan: Economic Effects and Institutional Settings*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Ito, Takatoshi. *Japanese Economy*. Massachusetts: The MIT Press, 1992.
- Japan: an Illustrated Encyclopedia*. Tokyo: Kondansha International, 1993.
- Kindleberger, Charles P. *The New Palgrave a Dictionary of Economic*. New York : Macmillan Press, 1996.
- Kingston, Jeff. *Japan's Quiet Transformation: Social Change and Civil Society in the Twenty-First Century*. London : Routledge Curzon, 2005.
- Komiya, Ryutaro. *The Japanese Economy : Trade, Industry, and Government*. Tokyo : University of Tokyo Press, 1993.
- Kunio, Yoshihara. *Perkembangan Ekonomi Jepang*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Kosai, Yutaka. *The Era High-Speed Growth*. Tokyo : University of Tokyo Press, 1991.
- Lincoln, Edward J. *Japan : Facing Economic Maturity*. US : The Brookings Institution, 1988.

Mason, David, Basin T, and Abdul M Turay. *US-Japan Trade Friction: It's Impact on Security Cooperatioan in the Pasific*. New York: Macmillan, 1990.

Nakamura, Takafusa. *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*.Tokyo: Kementerian Luar Negeri Jepang, 1985.

------. *Lecture on Modern Japanese Economic History1926-1994*. Tokyo : University of Tokyo Press, 1995.

------. *The Postwar Japanese Economy : The Development and Structure 1937-1994*. Tokyo : University of Tokyo Press, 1995.

Nakao, Shigeo. *The Political Economy of Japan Money*. Tokyo : University of Tokyo Press, 1995.

Rixtel, Adrian Van. *Informality and Monetary Policy in Japan*. US: Cambridge of University Press, 2002.

Ryuichiro, Tachi. *The Contemporary Japanese Economy: An Overview*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1993.

Saburo, Okita. *Japan in the World Economy of the 1980's*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1989.

The Japan Book. Japan : Kodansha International, 2002.

White Papers of Japan 1981-1982. Tokyo: The Japan Institute of International Affairs, 1983.

Yamamura, Kozo. *Japan's Economic Structure: Should It Changes*. US : Society of Japanese Studies, 1990.

II. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Famous Bubbles from Tulip Mania to Japan's Bubble Economy. 1995. 12November2009.<<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/dotcon/historical/bubbles.html>>

Finance Ministers' Meeting. 1995. 10 Desember 2009. <<http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm>>

Japan Economic Development, 1996. 12 November 2009 <<http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c03cont.htm>>

Miller, Geoffrey P. *The Role of a Central Bank in a Bubble Economy*. 1999. 30 November 2009. <<http://gold-eagle.com/editorials/cscb002.html>>

Shiratsuka, Shigenori. *Asset Price Bubble, Process Stability and Monetary Policy: Japan's Experience*. 2002. 1 Desember 2009.

<<http://boj.or.jp/english/publication/mes/2001/me19.s1-14.pdf>>

Thornton, Mark. *The Japanese Bubble Economy*. 23 Mei 2004. 1 November 2009

<<http://www.LewRockwell.com/MarkThorntonArchives/htm>>

Okawa, Seiichi. *Kaya Raya, kok, Banyak Utang*. 1 April 1989. 1 Desember 2009.

<<http://www.majalah.tempinteraktif.com/id/arsip/1989/04/01/LN/mbm.19890401.LN20525.id.html>>

Bubble Economy. 1999. 10 November 2009.

<<http://www.economy-watch.com/economy-articles/bubbles-economy.html>>

Japan Statistical Profile 1981-1985. 1 Desember 2009.

<<http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?queryname=18159&querytype=vew&lang=en>>

